

**DISINTEGRASI SOSIAL (STUDI REGULASI PERLINDUNGAN
IKAN PARI MANTA MASYARAKAT LAMAKERA
KABUPATEN FLORES TIMUR)**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat guna memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan Pada Jurusan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh

**RANDI M PRAKON
10538 294814**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
SEPTEMBER 2018**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Disintegrasi Sosial (Studi Regulasi Perlindungan Ikan Pari Manta Masyarakat Lamakera Kabupaten Plores Timur)

Nama : Randi M Prakon

NIM : 10538294814

Prodi : Pendidikan Sosiologi

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diteliti dan diperiksa ulang skripsi ini telah memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan di depan tim penguji skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.



08 Safar 1440 H

Makassar

18 Oktober 2018 M

Disahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muhammad Nawir, M.Pd.

Kaharuddin, S.Pd., M.Pd., Ph.D.

Mengetahui

Dekan FKIP
Universitas Muhammadiyah Makassar
Dr. Win. Anas S.Pd., M.Pd., Ph.D.
NBM: 860 934

Ketua Program Studi
Pendidikan Sosiologi
Dr. H. Nurdin, M.Pd.
NBM: 575 474

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Randi M Prakon**, NIM 10538294814 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 189/Tahun 1440 H/2018 M, Sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar **Sarjana Pendidikan** pada Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Yudisium pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2018.

08 Safar 1440 H
Makassar, _____
18 Oktober 2018 M

PANITIA UJIAN

Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE / MM

Ketua : Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.

Sekretaris : Dr. Baharullah, M.Pd.

Penguji :

1. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE, MM
2. Kaharuddin, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
3. Dr. Eliza Meiyani, M.Si.
4. Lukman Ismail, S.Pd., M.Pd.



The seal of Universitas Muhammadiyah Makassar Faculty of Education and Social Sciences is circular with a sunburst in the center. The text around the seal reads 'UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR' at the top and 'FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN' at the bottom. There are several handwritten signatures in blue ink over the seal and the list of examiners.

Mengetahui

Dekan FKIP
Universitas Muhammadiyah Makassar



Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
NBM: 860.934

Ketua Program Studi
Pendidikan Sosiologi



Drs. H. Nurdin, M.Pd.
NBM: 575.474

MOTO DAN PERSEMBAHAN

*ALLAH TIDAK MEMBEBANI SESEORANG MELAINKAN SESUAI
KESANGGUPANNYA (QS. AL-BAQARAH 02 : AYAT 286)*

Kupersembahkan karya ini untuk ayah dan ibuku tercinta,
saudara-saudaraku, keluarga, sahabat serta seluruh kawan-kawanku.

Terima kasih do'a dan motivasinya selama ini.

ABSTRAK

Rhandi M Prakon, 2018. Disintegrasi sosial studi regulasi perlindungan ikan pari manta masyarakat Lamakera Kabupaten Flores Timur. Skripsi Jurusan pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Di bimbing oleh Muhammad Nawir selaku pembimbing I dan Kaharuddin selaku pembimbing II

Penelitian ini dilatar belakangi terjadinya konflik antara masyarakat yang pro dengan pemerintah dan masyarakat yang kontra dengan pemerintah. Dimana masalah konflik ini terjadi bermula pada saat pemerintah melakukan sosialisasi tentang perlindungan ikan pari manta dimana ada sebagian masyarakat mencoba untuk mensukseskan aturan tersebut maka masyarakat yang menolak melakukan perlawanan dan mengakibatkan kerusuhan terjadi dalam forum sosialisasi di seminar tersebut sampai terjadinya disintegrasi sosial.

Penelitian ini digunakan untuk menjawab dua rumusan masalah pokok, yaitu bagaimanakah bentuk disintegrasi sosial masyarakat Lamakera Kabupaten Flores Timur, dan bagaimanakah implikasi sosial regulasi perlindungan ikan pari manta di Lamakera Kabupaten Flores Timur.

Penelitian yang dilaksanakan merupakan penelitian sosial budaya yang jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan cara menentukan sampel melalui teknik *Purposive Sampling* dengan memilih beberapa informan yang memiliki kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti, yakni masyarakat nelayan, tokoh pemuda dan pemerintahan desa.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konflik sosial yang dikemukakan oleh Karl Marx. Penelitian ini merupakan suatu penelitian etnografi yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data kualitatif. Penggalan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan beberapa data sekunder yang mendukung penelitian ini, seperti buku-buku, browsing internet, dan penelitian sebelumnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk disintegrasi sosial masyarakat Lamakera kabupaten Flores Timur berupa, pergolakan daerah yaitu kesenjangan yang terjadi dalam kebijakan politik mengenai adanya aturan tentang perlindungan ikan pari manta di Lamakera oleh pemerintah kabupaten Flores Timur sehingga terjadinya konflik sosial antara individu dengan individu atau kelompok.

Kata kunci : Disintegrasi Sosial, Regulasi, Pari Manta

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah Swt karena berkat Rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad Saw, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga pada umatnya hingga akhir zaman.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis sadar bahwa skripsi ini dapat terselesaikan seperti sekarang ini karena berkat bantuan dari orang-orang yang selama ini telah membantu, mendukung, dan membimbing penulis. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih buat orang-orang yang paling berharga dalam kehidupan penulis. Ayahanda Musa M Prakon dan Ibunda Aisyah Musa, penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk semua bimbingannya, nasehatnya, dan dukungannya hingga penulis bisa jadi seperti sekarang, buat saudara-saudaraku serta keluargaku yang selama ini banyak memberikan bantuan dan dukungan.

Tidak lupa juga penulis mengucapkan terimakasih kepada; Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar Erwin Akib, M.Pd., Ph.D., Ketua Program Studi Pendidikan Sosiologi Drs. H. Nurdin, M.Pd.

Terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Dr. Muhammad Nawir, M.Pd. selaku pembimbing I dan Bapak Kaharuddin, S.Pd., M.Pd., Ph.D selaku pembimbing II, serta seluruh dosen dan para staf pegawai dalam

lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membekali penulis dengan serangkaian ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.

Terima kasih tak terhingga kepada Ayahanda Drs. Alwan Suban, Dr. M Thahir Maloko, M.Hi, Nurdin Taher, M.Pd, Mahmud Seran, S.Ag, Dahlan Sulaiman, S.Ag, Abubakar Sulaiman, S.Ag, Algadri Manaf, ST, Muztahid, SE, atas doa, dukungan dan motivasinya serta bantuannya selama penulis menjalani proses perkuliahan sampai dapat menyelesaikan studinya.

Ucapan terima kasih juga penulis mengucapkan kepada kakanda, adinda sahabat dan saudara tercinta asrama HIPPMAL Makassar yang selalu setia menemani dan memberikan masukan selama penulis berada dalam bangku perkuliahan hingga penulisan skripsi ini. Rekan seperjuangan Sosiologi angkatan 2014 selalu mendampingi penulis dan memberi motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi, semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Semoga Allah Swt memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya hanya kepada Allah Swt penulis serahkan segalanya mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Makassar, Oktober 2018

Randi M Prakon

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERJANJIAN	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB. I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB. II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kajian Teori	9
1. Hasil Penelitian Yang Relevan	9
2. Konsep Disintegrasi Sosial	10
3. Bentuk-bentuk Disintegrasi Sosial	17
4. Faktor Terjadinya Disintegrasi Sosial	18

5. Regulasi Perlindungan Ikan Pari Manta	21
6. Masyarakat Nelayan	22
7. Landasan Teori Sosiologis	26
B. Kerangka Pikir	32
BAB III . METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
C. Informan Penelitian	36
D. Fokus Penelitian	37
E. Instrument Penelitian	37
F. Jenis dan Sumber Data	38
G. Teknik Pengumpulan Data	39
H. Teknik Analisis Data	41
I. Teknik Keabsahan Data	43
BAB IV. DESKRIPSI UMUM DAERAH PENELITIAN DAN DESKRIPSI KHUSUS LATAR PENELITIAN	
A. Deskripsi Umum Kabupaten Flores Timur sebagai Daerah Penelitian.	45
1. Sejarah singkat Flores Timur	45
2. Kondisi Geografis dan Iklim	48
3. Topografi, Geologi dan Hidrologi	50
4. Kondisi Demografi	51
B. Deskripsi khusus Lamakera sebagai Latar Penelitian.	54
1. Sejarah singkat Lamakera.	54
2. Tingkat pendidikan.	56

3. Mata pencaharian.	57
4. Kondisi sosial Budaya.	58
5. Kehidupan keberagaman.	59
BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	61
1. Bentuk disintegrasi sosial masyarakat Lamakera	61
2. Implikasi sosial regulasi perlindungan ikan pari manta di Lamakera Kabupaten Flores Timur	67
B. Pembahasan	69
1. Bentuk disintegrasi sosial masyarakat Lamakera	71
2. Implikasi sosial regulasi perlindungan ikan pari manta di Lamakera Kabupaten Flores Timur	73
3. Langkah Prefentif atau pencegahan Disintegrasi Sosial Masyarakat Lamakera.	74
BAB VI. PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
Lampiran-Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel. 3.1 Data dan sumber data	39
Tabel. 4.1 Tahun 1958 Kecamatan di Kabupaten Flores Timur	45
Tabel. 4.2 Pemekaran Kecamatan Lomblen dan Solor	46
Tabel. 4.3 Tahun 1999 Kecamatan terdiri dari	46
Tabel. 4.4 Tahun 2001 Kecamatan terdiri dari	47
Tabel. 4.5 Tahun 2006 Kecamatan terdiri dari	47
Tabel. 4.6 Luas wilayah Kabupaten menurut Kecamatan	49
Tabel. 4.7 Tingkat kemiringan, ketinggian dan tekstur tanah	50
Tabel. 4.8 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Flores Timur Tahun 2016	51
Tabel.4.9 Persentase Penduduk Usia di Atas 10 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah yang Dimiliki Tahun 2016	52
Tabel.4.10 Jumlah Penduduk Kabupaten Flores Timur Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016	53
Tabel.4.11 Daftar nama-nama kepala Desa di Lamakera	54
Tabel.4.12 Tingkat Pendidikan Lamakera	56
Tabel.4.13 Keadaan Ekonomi Penduduk Lamakera	57
Tabel.4.14 Jumlah penduduk berdasarkan Agama	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar. 2.1 Bagan kerangka pikir	34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Lembar Observasi	78
2. Pedoman Wawancara	79
3. Data Informan dalam Wawancara.....	80
4. Data Hasil Wawancara	81
5. Poto-poto	86
6. Administrasi Penelitian	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan di mana pada dasarnya dapat mengandung potensi kerawanan akibat keanekaragaman suku bangsa, bahasa, agama, ras dan etnis golongan. Hal tersebut merupakan faktor yang berpengaruh terhadap potensi timbulnya konflik. Di mana dengan semakin marak dan meluasnya konflik akhir-akhir ini, merupakan suatu pertanda menurunnya rasa nasionalisme di dalam masyarakat. Kondisi seperti ini dapat dilihat dengan meningkatnya konflik yang bernuansa SARA (suku, agama, ras dan antar etnis golongan), serta munculnya gerakan-gerakan yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akibat dari ketidakpuasan dan perbedaan kepentingan. Apabila kondisi ini tidak segera ditangani dengan baik maka akan berdampak pada disintegrasi bangsa. Seperti halnya disintegrasi sosial yang terjadi di masyarakat Lamakera.

Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. Manusia mempunyai perbedaan jenis kelamin, strata sosial dan ekonomi, sistem hukum, bangsa, suku, agama, kepercayaan, aliran politik, serta budaya dan tujuan hidupnya. Dalam sejarah umat manusia perbedaan inilah yang selalu menimbulkan konflik. Selama masih ada perbedaan tersebut, konflik tidak dapat dihindari dan selalu akan terjadi. Dari sini, ada benarnya jika sejarah umat manusia merupakan sejarah konflik. Konflik selalu terjadi di dunia, dalam sistem sosial yang bernama

negara, bangsa, organisasi, perusahaan, dan bahkan sistem sosial terkecil yang bernama keluarga dan pertemanan. Konflik terjadi di masa lalu, sekarang, dan pasti akan terjadi di masa yang akan datang.

Lamakera terletak di Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur. Wilayah perairan Flores Timur dikaruniai kekayaan alam laut yang sangat luar biasa banyak. Berbagai jenis ikan ekonomi penting, ikan karang, dan bergai jenis pari termasuk pari manta. Secara turun-temurun dan tradisi adat masyarakat tersebut telah lama memanfaatkan pari manta sebagai salah satu mata pencarian mereka. Pari manta ditangkap lalu dijual kepada pedagang pengumpul untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Di mana ada permintaan pari manta, maka nelayan akan memenuhi permintaan tersebut. Telah ada hubungan erat antara nelayan dan pedagang pengumpul atau pembeli pari manta.

Lamakera tidaklah asing dengan penangkapan ikan pari manta . Keahlian menangkap manta sudah diwariskan secara turun temurun ratusan tahun yang lalu oleh nenek moyang penduduk kampung Lamakera. Menurut pengakuan nelayan, penangkapan manta atau dalam bahasa local disebut dengan *belelang* dilakukan bergantung musim dan kondisi cuaca: “dulu biasanya belelang di ambil di selatan, itu *belelang* kaluar kalau air bagus.

Perlu diketahui bahwa, pari manta merupakan salah satu jenis ikan yang telah dilindungi secara penuh oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2014. Perlindungan penuh ditetapkan ketika suatu spesies atau jenis ikan telah terancam kepunahannya, sehingga jika terus-menerus diambil akan menyebabkan kepunahan bagi jenis

ikan tersebut. Dengan perlindungan penuh pari manta tersebut, menempatkan posisi yang sama dengan spesies lainnya seperti gajah, harimau serta spesies lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Keluarnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2014 tentang perlindungan penuh ikan pari manta mendapatkan penolakan oleh masyarakat Kampung Lamakera. Bagaimana tidak, selain menjadi tradisi, pari manta merupakan salah satu komoditas perikanan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Di sisi lain penegakan aturan ini dengan melakukan penangkapan nelayan Lamakera pada Juli 2015 lalu menimbulkan ketegangan dan situasi yang memanas antara masyarakat nelayan dengan pemerintah (Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur) serta aparat penegak hukum. Pendekatan dan upaya konsolidasi baik dari Pemerintah maupun dari LSM pun kerap mengalami penolakan. Tercatat sebelumnya pada bulan Oktober tahun 2015 Pemerintahan Daerah sudah melakukan sosialisasi langsung di Kampung Lamakera. Sedangkan pada tahun 2016 pertemuan yang diadakan di Kantor Bappeda Kabupaten Flores Timur diwarnai sedikit kericuhan. Dari berbagai upaya yang dilakukan, sudah ada kemajuan yang dihasilkan diantaranya adalah dengan dideklarasikannya kelompok nelayan yang tidak lagi menangkap manta. Namun sebagian masyarakat lainnya masih belum melakukan hal yang sama. Hal ini pun menimbulkan pergesekan diantara kelompok yang mendeklarasikan diri dengan kelompok yang tidak. Terakhir, pada awal bulan Mei 2017 ini terjadi upaya pemeriksaan oleh polair terhadap nelayan yang diduga menangkap ikan pari

manta berakhir dengan antiklimaks. Upaya tersebut semakin menambah ketegangan yang sudah terjadi di masyarakat kampung Lamakera.

Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah (Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur) terkait perlindungan ikan pari manta berakhir dengan konflik antara masyarakat nelayan, karena ada masyarakat yang pro dengan kebijakan pemerintah sehingga masyarakat yang kontra dengan pemerintah tersebut melakukan tindakan berupa ancaman kepada masyarakat yang pro dengan pemerintah dan menimbulkan pertikaian yang terjadi antara masyarakat yang pro dan yang kontra tersebut, setelah pertikaian terjadi tidak ada penyelesaian yang dilakukan sehingga menimbulkan disintegrasi sosial antara masyarakat dengan pemerintah maupun masyarakat dengan masyarakat.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Rosi Windiyani Rahayu (2013) yang berjudul “Disintegrasi Kehidupan Sosial Terhadap Konflik Sosial” menyatakan bahwa penyebab lahirnya disintegrasi yakni dilatarbelakangi oleh masalah kurang terjalin suatu kerukunan dan kebersamaan sehingga menimbulkan terjadinya kekacauan dan saling menghancurkan serta kurangnya penanaman nilai-nilai pancasila dalam masyarakat. Sedangkan penelitian dari Supriyanto yang berjudul “Peran Komunikasi Politik Pemerintah dalam Mencegah Disintegrasi Bangsa” menyatakan bahwa gejala disintegrasi sosial yang disebabkan krisis ekonomi, politik, moral dan akhlak, serta krisis kepercayaan kepada lembaga-lembaga pemerintahan terjadi karena gagalnya pemerintah dalam menjalankan komunikasi politik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hubungan pusat dengan daerah secara politis, daerah hanya dijadikan objek oleh Negara

dengan menerima beban, tugas dan kewajiban dari Negara tanpa pernah bisa mengembangkan kreasi dan inovasi dari daerah, hal ini terlihat dari sumber pembiayaan anggaran pendapatan belanja Daerah (APBD) sebagian besar ditanggung anggaran pendapatan belanja Negara (APBN), sedangkan sebagian besar kekayaan daerah diambil oleh pemerintah pusat dengan pembagian merata pada semua Daerah.

Adapun menurut hasil penelitian Sofyan yang berjudul “Pendidikan Multikulturalisme : Solusi Ancaman Disintegrasi Bangsa” menyatakan bahwa kerusuhan-kerusuhan yang terjadi akhir-akhir ini merupakan suatu strategi yang timbul karena adanya kemajemukan yang tidak disikapi secara arif, sehingga menimbulkan jarak sosial yang menjadi potensi konflik serta dapat menimbulkan disintegrasi sosial, yakni termasuk nilai-nilai dan kekuatan konflik yang ditunjukkan dengan adanya perbedaan agama dan kesenjangan ekonomi diantara kedua etnis. Keanekaragaman suku ini kadang sulit dipersatukan dimana mereka bertahan dengan pandangan sempit, egoisme kesukuan daerah masing-masing sehingga gesekan-gesekan konflik pecah menjadi sebuah pertumpahan darah. Dimana konflik yang terjadi di daerah sering diidentikan dengan konflik fisik yang cenderung dengan penggunaan kekerasan terhadap musuhnya.

Dari ketiga jurnal di atas dapat disimpulkan bahwa segala bentuk permasalahan baik politik, agama, sosial, ekonomi maupun kemanusiaan, sebenarnya memiliki kesamaan faktor yakni tidak adanya keadilan yang diterima oleh masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat

dalam menerapkan kebijaksanaannya sehingga terjadi konflik seperti yang terjadi di Lamakera

Dengan hadirnya regulasi perlindungan ikan pari manta yang ada di laut selat Lamakera Kabupaten Flores Timur, masyarakat Lamakera merasa tidak diperbolehkan untuk menangkap ikan pari manta yang ada dipesisir laut selat Lamakera sehingga menyebabkan suatu bentuk konflik yang terjadi di masyarakat Lamakera dan menyebabkan terjadinya disintegrasi sosial. Pada umumnya mata pencaharian masyarakat Lamakera semata-mata hanya nelayan (penombakan ikan pari manta), ini merupakan suatu tradisi yang sudah diturunkan oleh para leluhur masyarakat Lamakera untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan sudah menjadi budaya.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dimasyarakat Lamakera maka penulis mengangkat permasalahan yang ingin diteliti dengan judul penelitian *“Disintegrasi Sosial (Studi Regulasi Perlindungan Ikan Pari Manta Masyarakat Lamakera Kabupaten Flores Timur)”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah bentuk disintegrasi sosial masyarakat Lamakera Kabupaten Flores Timur ?
2. Bagaimanakah implikasi sosial regulasi perlindungan ikan pari manta di Lamakera Kabupaten Flores Timur ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan memperoleh data tentang :

1. Untuk mengetahui bentuk disintegrasi sosial masyarakat Lamakera Kabupaten Flores Timur.
2. Untuk mengetahui implikasi sosial regulasi perlindungan ikan pari manta di Lamakera Kabupaten Flores Timur.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat, baik manfaat teoritis, maupun manfaat praktis :

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang hal-hal yang menyebabkan disintegrasi sosial masyarakat Lamakera Kabupaten Flores timur sehingga bisa dijadikan acuan dalam meminimalisir terjadinya disintegrasi sosial di Lamakera

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan wawasan bagi masyarakat tentang dampak dari disintegrasi sosial. Serta memberikan informasi bagi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan terjadinya konflik yang bisa mengakibatkan disintegrasi sosial di Lamakera.

- b. Bagi nelayan, agar lebih memahami apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta diharapkan dapat membantu dalam usaha memperbaiki kesejahteraan hidup para nelayan.
- c. Bagi pemerintah, sebagai sumber dan bentuk masukan bagi pemerintah untuk memberikan sosialisasi dan pengetahuan kepada masyarakat agar selalu mentaati peraturan-peraturan yang berlaku dan membantu pemerintah dalam mencari solusi untuk meminimalisir terjadinya disintegrasi sosial.
- d. Bagi peneliti, sebagai pengetahuan dan pengalaman serta latihan dalam berfikir bagi peneliti dalam mengaplikasikan ilmu yang didapat selama duduk di bangku perkuliahan. Selain itu, peneliti diharapkan dapat memberikan motivasi kepada rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian dari sisi lain dan dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian dengan judul *Disintegrasi sosial masyarakat* sebelumnya sudah pernah dilakukan. Berikut beberapa peneliti yang berhubungan dengan *Disintegrasi sosial masyarakat*.

Pertama Saidah (2016) dengan judul disintegrasi sosial antara Mahasiswa dengan Warga Kota Makassar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya disintegrasi sosial antara Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar dengan Warga Kota Makassar. Penelitian yang dilaksanakan merupakan penelitian sosial budaya yang jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan cara penentuan sampel melalui teknik *purposive sampling* dengan memilih beberapa informan yang memiliki kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti.

Kedua Raden Istawa Maulana (2016) dengan judul konflik kelas nelayan tradisional kampung benteng kecamatan moro dan nelayan semi moderen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses terjadi konflik kelas nelayan tradisional dengan nelayan jaring kurau. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi.

Ketiga Antony Wijaya (2010) dengan judul manajemen konflik sosial dalam masyarakat nelayan (studi kasus pertentangan dan pertikaian nelayan tradisional di kelurahan pasar bengkulu dengan nelayan modern di kelurahan kandang kota bengkulu). Tujuan penelitian ini antara lain untuk mengetahui penyebab terjadinya konflik antara nelayan tradisional dengan nelayan modern di Kota Bengkulu serta bagaimana konflik kedua kelompok nelayan tersebut diselesaikan oleh Pemerintah Kota dan Pemerintah Propinsi Bengkulu.

Penelitian-penelitian tersebut dijadikan referensi atas dasar kesamaan pembahasan utama, yaitu mengenai konflik sosial masyarakat, Penelitian ini juga memiliki perbedaan diantaranya lokasi penelitian serta tujuan penelitian yang ingin dicapai.

2. Konsep Disintegrasi Sosial

Menurut Soekanto (2012), disintegrasi dapat dirumuskan sebagai suatu proses berpadunya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat karena perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Proses perubahan sosial akan menyebabkan nilai dan norma masyarakat menjadi tergeser atau berubah. Dengan demikian, gejala-gejala disorganisasi dan disintegrasi pada awalnya dimulai dari hal-hal sebagai berikut :

- a. Tidak ada lagi kesepakatan anggota kelompok mengenai tujuan sosial yang hendak dicapai yang semula menjadi pegangan kelompok tersebut.
- b. Norma-norma sosial tidak lagi membantu anggota masyarakat dalam mencapai tujuan yang disepakati.

- c. Norma-norma dalam kelompok yang dihayati oleh setiap anggota dianggap tidak sesuai lagi. Sehingga setiap anggota kelompok mengabaikan norma-norma yang ada.
- d. Sudah lemah, bahkan sudah tidak dilaksanakan secara konsekuen. Sanksi yang dikenakan pada orang yang melanggar norma dianggap sudah tidak berlaku
- e. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat sudah bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Jadi disintegrasi atau disorganisasi merupakan proses pembentukan nilai-nilai baru, baik yang akan mengurangi ikatan dalam masyarakat itu sendiri maupun integrasi masyarakat yang pada akhirnya bergantung pada keinginan masyarakat.

Adanya disintegrasi dalam kehidupan bermasyarakat harus diimbangi dengan reintegrasi yang bertujuan untuk mengembalikan keadaan yang diinginkan sesuai dengan tujuan persatuan dan keutuhan masyarakat. Reintegrasi atau reorganisasi adalah proses pembentukan kembali norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengalami perubahan. Reintegrasi terlaksana apabila norma-norma atau nilai-nilai baru telah melembaga dalam diri warga masyarakat. pada dasarnya, setiap perubahan bisa mengakibatkan terjadinya perbedaan tanggapan atau penafsiran. Hal tersebut berakibat tidak sedikit terjadinya reaksi terhadap suatu perubahan.

Adapun ciri-ciri terjadinya disintegrasi di suatu masyarakat antara lain :

- 1) Ketidaksamaan tujuan antara anggota suatu kelompok sehingga tidak ada keterpaduan.
- 2) Sebagian besar anggota kelompok tidak mematuhi norma-norma yang berlaku.
- 3) Menurunnya wibawa tokoh-tokoh pemimpin kelompok.
- 4) Kurang berfungsinya sanksi sebagaimana mestinya.

Jadi disintegrasi dapat diartikan sebagai keadaan tidak bersatu padu, keadaan terpecah belah, hilangnya keutuhan atau persatuan, dan perpecahan yang disebabkan tidak berlakunya norma-norma di masyarakat. Dalam ilmu sosiologi disintegrasi diartikan sebagai proses terpecahnya suatu kesatuan menjadi bagian-bagian kecil yang terpisah satu sama lain. Disintegrasi juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana orang-orang dalam masyarakat tidak dapat lagi menjalin kerukunan dan kebersamaan, melainkan saling bertikai dan saling menghancurkan sehingga terjadi perpecahan dalam kehidupan sosial.

Adapun Pengertian sosial menurut para ahli yaitu :

- a. Menurut Lewis (Dalam Sukmawati, 2015: 8) mengatakan sosial adalah sesuatu yang dicapai, dihasilkan dan diterapkan dalam interaksi sehari-hari antara warga negara dan pemerintahannya.
- b. Menurut Keith Jacobs (Dalam Sukmawati, 2015: 8) mengatakan sosial adalah sesuatu yang dibangun dan terjadi dalam sebuah komunitas.

- c. Ruth Aylett (Dalam Sukmawati, 2015: 9) mengatakan sosial adalah sesuatu yang dipahami sebagai sebuah perbedaan namun tetap inheren dan terintegrasi.
- d. Philip Wexler (Dalam Sukmawati, 2015: 9) mengatakan sosial adalah sifat dasar dari individu.
- e. Enda M. C (Dalam Sukmawati, 2015: 9) mengatakan sosial adalah cara tentang bagaimana para individu saling berhubungan.
- f. Peter Herman (Dalam Sukmawati, 2015: 9) mengatakan sosial adalah sesuatu yang dipahami sebagai sesuatu perbedaan namun tetap merupakan sebagai suatu kesatuan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sosial adalah proses interaksi sehari-hari yang saling berhubungan satu sama lain dan merupakan suatu kesatuan. Jadi disintegrasi sosial adalah suatu keadaan dimana tidak adanya keutuhan atau persatuan dan terjadinya perpecahan di dalam suatu masyarakat dikarenakan pudarnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat yang disebabkan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan.

Disintegrasi merupakan proses sosial yang pasti akan terjadi ditengah-tengah masyarakat dinamis. Disintegrasi terjadi karena adanya konflik sosial antara individu atau kelompok masyarakat. Dimana dalam konflik pasti ada perselisihan dan pertentangan diantara pihak-pihak yang berkonflik. Konflik bisa dialami oleh siapa saja pada berbagai lapisan sosial masyarakat.

Banyak faktor yang telah menyebabkan terjadinya konflik. Perbedaan pendirian dan keyakinan orang perorangan telah menyebabkan konflik antar individu. Dalam konflik seperti ini terjadi bentrokan-bentrokan pendirian, dan masing-masing pihak berusaha membinasakan lawannya.

Selain itu, menurut Suratman (2010), terdapat beberapa teori yang menunjukkan penyebab konflik di tengah masyarakat, yakni pertama teori hubungan masyarakat, memiliki pandangan bahwa konflik yang sering muncul ditengah masyarakat disebabkan polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan diantara kelompok yang berbeda, perbedaan bisa dilatarbelakangi isu SARA. Kedua, teori identitas yang melihat bahwa konflik yang mengeras di masyarakat tidak lain disebabkan identitas yang terancam yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan masa lalu yang tidak terselesaikan. Ketiga, teori kesalahpahaman antar budaya, teori ini melihat konflik disebabkan ketidakcocokan dalam cara-cara berkomunikasi diantara budaya yang berbeda. Keempat, teori transformasi yang memfokuskan pada penyebab terjadi konflik adalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial budaya dan ekonomi.

Jadi realitas keragaman budaya di dalam masyarakat tentu membawa konsekuensi munculnya persoalan antar budaya yang mempengaruhi dinamika kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, timbulnya perselisihan dan pertentangan yang tidak dikendalikan dan tidak disalurkan oleh disiplin, kode etik, norma-norma dan kaidah-kaidah persatuan maka keutuhan persatuan akan hancur. Sebab perselisihan dan pertentangan yang tidak terkendalikan itu akan membawa kepada

perpecahan sehingga menimbulkan penggolongan dalam masyarakat yang melemahkan dan membuyarkan potensi perjuangan. Dimana, dengan timbulnya perpecahan itu kekuatan perjuangan akan hancur, daya tahannya menjadi lemah dan moralnya pun runtuh.

Menurut Selo Soemardjan (Dalam Jufri, 2015: 24) mengatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Adanya suatu perubahan dalam masyarakat akibat perubahan sosial bergantung pada kegiatan masyarakat itu sendiri yang mengalami perubahan sosial. Dimana perubahan sosial yang terjadi tidak selamanya suatu kemajuan (progress). Tetapi juga suatu kemunduran dalam masyarakat.

Perubahan sosial ditandai dengan semakin berkembangnya tingkat pendidikan masyarakat sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak selamanya diterima masyarakat. kadang-kadang masyarakat menolak suatu kebijakan apabila dianggap merugikan atau terlalu memberatkan masyarakat. Misalnya, penetapan status perlindungan ikan pari panta . Penolakan dapat pula berupa protes dan demonstrasi. Contohnya, aksi protes masyarakat Lamakera terhadap pemerintah Kabupaten Flores Timur pada saat sosialisasi penetapan status perlindungan ikan pari manta di Gedung ruang tunggu Pelabuhan Lamakera, dimana dengan aksi protes tersebut mengakibatkan disintegrasi sosial antara masyarakat Lamakera dengan pemerintah bahkan masyarakat dengan masyarakat.

Disintegrasi sosial yang terjadi akan mempunyai kekuatan yang melemahkan kedudukan seseorang yang memiliki kekuasaan. Disintegrasi sosial antara masyarakat Lamakera dengan pemerintah Kabupaten Flores Timur terjadi karena disebabkan adanya konflik sosial yang terjadi dalam pemerintah Kabupaten Flores Timur dan cara kerja sebuah instansi sehingga muncul aksi masyarakat karena kecewa dan ketidakpuasan terhadap apa yang dilakukan, protes masyarakat Lamakera dimana mereka melakukan aksi protes terhadap pemerintah dan berujung konflik.

Masyarakat tersebut melakukan adu dorong dengan masyarakat yang pro dengan pemerintah, selain itu konflik yang terjadi antara masyarakat dengan masyarakat disebabkan karena ada masyarakat yang sepakat dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga lahirlah disintegrasi sosial antara masyarakat dengan masyarakat.

Secara sosiologis, konflik lahir karena adanya perbedaan-perbedaan yang tidak atau belum dapat diterima oleh suatu individu dengan individu lain atau antara satu kelompok dengan kelompok tertentu. Dalam kehidupan masyarakat perubahan sosial kadang-kadang dapat menimbulkan ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan tersebut dapat disebabkan adanya kesenjangan budaya dalam masyarakat (disintegrasi sosial).

Adapun gejala yang menyebabkan terjadinya disintegrasi sosial adalah sebagai berikut :

- 1) Tidak ada persepsi atau persamaan pandangan diantara anggota masyarakat mengenai norma yang semula dijadikan pegangan oleh anggota masyarakat.

- 2) Norma-norma masyarakat tidak berfungsi dengan baik sebagai alat untuk mencapai tujuan masyarakat.
- 3) Timbul pertentangan norma-norma dalam masyarakat, sehingga menimbulkan kebingungan bagi anggota masyarakat itu sendiri.

3. Bentuk-bentuk Disintegrasi Sosial

a) Pergolakan Daerah

Dalam rekam jejak perjalanan bangsa Indonesia, beberapa kejadian mengenai konflik/pergolakan daerah sudah banyak terjadi. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya suatu kesenjangan. Kesenjangan tersebut bisa berupa kesenjangan dalam hal kebijakan politik, kesenjangan ketidakadilan, kesenjangan masalah etnis, kesenjangan konflik agama, dan lain sebagainya.

b) Demonstrasi

Demonstrasi menjadi suatu fenomena yang seringkali kita temukan pada saat ini. Dinamika yang terjadi dalam bidang ketatanegaraan yang terjadi di era reformasi turut mempengaruhi terhadap suatu perubahan perilaku masyarakat. Sebelum era reformasi, rakyat mempunyai keterbatasan dalam menyuarakan aspirasinya secara langsung. Kegiatan aksi atau demonstrasi baik secara individu maupun kolektif akan mendapatkan suatu konsekuensi yang keras dari pihak pemerintah orde baru. Berbeda dengan era demokrasi yang terjadi pada saat sekarang ini. Hampir di setiap sebuah kebijakan pemerintah yang menuai kontroversi, kita menemukan banyak aksi demonstrasi yang terjadi seiring dengan perancangan kebijakan pemerintah yang dianggap kurang menguntungkan bagi

golongan tertentu. Golongan tersebut dapat berupa sekelompok ormas, pergerakan mahasiswa, ikatan buruh, persatuan guru, dan lain sebagainya.

c) Kriminalitas

Perkembangan teknologi juga membawa dampak pada disintegrasi sosial. Dewasa ini tindak kriminalitas tidak hanya yang sifatnya kasat mata saja, misalnya perampokan, pembunuhan, pencurian, penjambretan, pembegalan, dan lain sebagainya. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mengakibatkan berkembangnya variasi modus dalam melakukan suatu tindak kejahatan. Misalnya penipuan bermodus undian berhadiah melalui telfon dan berbagai kejahatan yang difasilitasi oleh jaringan internet. Dewasa ini kepolisian sudah membentuk sebuah divisi khusus untuk menangani kasus-kasus yang bermoduskan internet. Hal tersebut dikarenakan begitu maraknya kasus penipuan dan lain-lain yang memkaai fasilitas internet dan telepon.

d) Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja adalah suatu kegiatan anti sosial yang diperbuat oleh seseorang yang beranjak dewasa (remaja), bila hal tersebut dilakukan oleh orang dewasa bisa dikategorikan sebagai tindak kejahatan (crime).

4. Faktor Terjadinya Disintegrasi Sosial

Penyebab timbulnya disintegrasi sosial juga dapat terjadi karena perlakuan yang tidak adil dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah khususnya pada daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya/kekayaan alamnya berlimpah/berlebihan, sehingga daerah tersebut mampu menyelenggarakan pemerintahan sendiri dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi.

Selain itu disintegrasi sosial dipengaruhi oleh perkembangan politik dewasa ini. Dalam kehidupan politik sangat terasa adanya pengaruh dari statemen politik para elit maupun pimpinan nasional, yang sering mempengaruhi sendi-sendi kehidupan bangsa, sebagai akibat masih kentalnya bentuk-bentuk primordialisme sempit dari kelompok, golongan, kedaerahan bahkan agama. Hal ini menunjukkan bahwa para elit politik secara sadar maupun tidak sadar telah memprovokasi masyarakat. Keterbatasan tingkat intelektual sebagian besar masyarakat Indonesia sangat mudah terpengaruh oleh ucapan-ucapan para elitnya sehingga dengan mudah terpicuh untuk bertindak yang menjurus kearah terjadinya kerusuhan maupun konflik antar kelompok atau golongan.

Adapun faktor-faktor penyebab disintegrasi sosial, antara lain :

a. Ideologi

Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa Indonesia dalam penghayatan dan pengamalannya masih belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai dasar pancasila, bahkan saat ini sering diperdebatkan. Ideologi pancasila cenderung tergugah dengan adanya kelompok - kelompok tertentu yang mengedepankan faham liberal atau kebebasan tanpa batas, demikian pula faham keagamaan yang bersifat ekstrim baik kiri maupun kanan.

b. Politik

Berbagai masalah politik yang masih harus dipecahkan bersama oleh bangsa Indonesia saat ini seperti diberlakukannya otonomi daerah, sistem multi partai, sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang belum dapat diselesaikan secara tuntas karena berbagai masalah pokok inilah yang paling

rawan dengan konflik sosial berkepanjangan yang akhirnya dapat menyebabkan timbulnya disintegrasi sosial.

Selain itu, menurut Suratman (2010), menyatakan bahwa krisis politik merupakan perpecahan elit ditingkat nasional, sehingga menyulitkan lahirnya kebijakan utuh dalam mengatasi krisis ekonomi. Krisis politik juga dapat dilihat dari absennya kepemimpinan politik yang mampu membangun solidaritas sosial untuk secara solid menghadapi krisis ekonomi. Semua ini mengakibatkan kepemimpinan nasional semakin tidak efektif, maka kemampuan pemerintah dalam memberi pelayanan publik akan semakin merosot.

c. Ekonomi

Sistem perekonomian Indonesia yang masih mencari bentuk, yang dapat memberdayakan sebagian besar potensi sumber daya nasional. Hal ini dihadapkan dengan krisis moneter yang berkepanjangan, rendahnya tingkat pendapatan masyarakat dan meningkatnya tingkat pengangguran maka bisa mengakibatkan terjadinya disintegrasi di dalam masyarakat. Dimana masyarakat menginginkan kehidupan yang sejahtera sehingga melakukan tindakan yang bisa menarik perhatian dari pemerintah.

d. Sosial budaya

Kemajemukan bangsa Indonesia memiliki tingkat kepekaan yang tinggi dan dapat menimbulkan konflik etnis kultural. Arus globalisasi yang mengandung berbagai nilai dan budaya dapat melahirkan sikap pro dan kontra warga masyarakat yang terjadi adalah konflik tata nilai. Konflik tata

nilai akan membesar bila masing-masing mempertahankan tata nilainya sendiri tanpa memperhatikan yang lain. Dimana budaya yang satu merendahkan kebudayaan lain.

5. Regulasi Perlindungan Ikan Pari Manta

Regulasi adalah mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan. Regulasi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, misalnya: pembatasan hukum diumumkan oleh otoritas pemerintah, regulasi pengaturan diri oleh suatu industri seperti melalui asosiasi perdagangan, regulasi sosial (misalnya norma), co-regulasi dan pasar. Seseorang dapat, mempertimbangkan regulasi dalam tindakan perilaku misalnya menjatuhkan sanksi (seperti denda).

Teori regulasi disampaikan oleh Stigler (1971) yang mengatakan bahwa aktivitas seputar peraturan menggambarkan persaudaraan diantara kekuatan politik dari kelompok berkepentingan (eksekutif/industri) sebagai sisi permintaan/*demand* dan legislatif sebagai *supply*. Teori ini berpendapat bahwa dibutuhkan aturan-aturan atau ketentuan dalam akuntansi. Pemerintah dibutuhkan peranannya untuk mengatur ketentuan-ketentuan terhadap apa yang harus dilakukan perusahaan untuk menentukan informasi. Ketentuan diperlukan agar semuanya baik pemakai maupun penyaji mendapatkan informasi yang sama dan seimbang.

Menurut Scott (2009) terdapat dua teori regulasi yaitu *public interest theory* dan *interest group theory*. *Public interest theory* menjelaskan bahwa regulasi harus dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial dan *interest group*

theory menjelaskan bahwa regulasi adalah hasil lobi dari beberapa individu atau kelompok yang mempertahankan dan menyampaikan kepentingan mereka kepada pemerintah.

Teori regulasi menunjukkan hasil dari tuntutan publik atas koreksi terhadap kegagalan pasar. Dalam teori ini kewenangan pusat termasuk badan pengawas regulator diasumsikan memiliki kepentingan terbaik dihati masyarakat.

Regulasi perlindungan ikan pari manta termuat dalam aturan, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No 4/Kepmen-Kp/2014 Tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Pari Manta.

6. Masyarakat Nelayan

Masyarakat berasal dari kata musyarak (Arab), yang artinya bersama-sama, yang kemudian berubah menjadi masyarakat, yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat.

Menurut Emile Durkheim (dalam Soleman B. Taneko, 1984: 11) bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Masyarakat sebagai sekumpulan manusia didalamnya ada beberapa unsur yang mencakup.

Menurut aguste comte masyarakat adalah kenyataan sosial yang lebih dari sekedar bagian-bagian yang tergantung (Upe:2010), harus diteliti atas dasar fakta-fakta objektif serta menekankan penelitian-penelitian antara berbagai masyarakat berlainan (Soekanto:2009), sedangkan Spencer berpendapat dengan analogi organiknya menyebut masyarakat sebagai suatu keseluruhan yang mempunyai

individualitasnya sendiri karena terdapat hubungan permanen antara komponen-komponen tersendiri (Upe:2010). Berbagai penjelasan berkenaan dengan masyarakat yang dipandang dari berbagai aspek kehidupan telah memberikan gambaran mengenai masyarakat. Berbagai sudut pandang itu lahir dari latar belakang orang yang berbeda yang kemudian memperkaya kajian ilmu pengetahuan khususnya sosiologi.

Menurut Abdul Syani (2007:30) bahwa masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan yang tersendiri. Masyarakat dapat membentuk kepribadian yang khas bagi manusia, sehingga tanpa adanya kelompok, manusia tidak akan mampu untuk dapat berbuat banyak dalam kehidupan. Supaya dapat menjelaskan pengertian masyarakat secara umum, maka perlu ditelaah tentang ciri-ciri dari masyarakat itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto dalam Syani (2007:30), menyatakan bahwa sebagai suatu pergaulan hidup atau suatu bentuk kehidupan bersama manusia, maka masyarakat itu mempunyai ciri-ciri pokok yaitu :

- a. Manusia yang hidup bersama. Di dalam ilmu sosial tidak ada ukuran yang mutlak ataupun angka yang pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada. Akan tetapi secara teoritis, angka minimumnya ada dua orang yang hidup bersama.
- b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama. Kumpulan dari manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda-benda mati seperti umpamanya kursi, meja dan sebagainya. Oleh karena dengan berkumpulnya manusia, maka akan timbul

manusia-manusia baru. Manusia itu juga dapat bercakap-cakap, merasa dan mengerti, mereka juga mempunyai keinginan-keinginan untuk menyampaikan kesan-kesan atau perasaan-perasaannya. Sebagai akibat hidup bersama itu, timbullah sistem komunikasi dan timbullah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kelompok tersebut.

- c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan.
- d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan, oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yanglainnya.

Nelayan dalam Ensiklopedia Indonesia dinyatakan sebagai orang-orang yang secara aktif melakukan penangkapan ikan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai mata pencaharian. M.Khalil Mansyur (dalam Imron :2012) mengartikan nelayan dengan artian yang lebih luas lagi, yaitu masyarakat nelayan bukan berarti mereka yang dalam mengatur hidupnya hanya mencari ikan di laut untuk menghidupi keluarganya akan tetapi juga orang-orang yang interal dalam lingkungan itu.

Nelayan atau kelompok nelayan sesuai UU No 9 tahun 1985 adalah perorangan atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan yang mencakup, menangkap, membudidayakan, mendinginkan atau mengawetkan ikan dengan tujuan komersial. Nelayan dikenal sebagai masyarakat yang lekat dengan kemiskinan. Kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang dan papan pun terkadang sulit untuk dipenuhi secara sehat apalagi sempurna. Apalagi tentang pendidikan dan kesehatan, mungkin sangat jauh dari sempurna (Kalyanamitra,

2005). Kemiskinan, rendahnya pendidikan dan pengetahuan nelayan serta kurangnya informasi sebagai akibat keterisolasian pulau-pulau kecil merupakan karakteristik dari masyarakat pulau-pulau kecil (biasanya nelayan). Persoalan pendidikan ini tidak terlepas dari kemiskinan yang melingkupi masyarakat nelayan (Sulistyowati, 2003).

Pekerjaan sebagai nelayan tidak diragukan lagi adalah pekerjaan yang sangat berat. Mereka yang menjadi nelayan tidak dapat membayangkan pekerjaan lain yang lebih mudah Sesuai kemampuan yang mereka miliki. Keterampilan sebagai nelayan amat sederhana dan hampir sepenuhnya dapat dipelajari dari orang tua mereka sejak mereka masih anak-anak. Apabila orang tua mereka mampu, mereka pasti akan berusaha menyekolahkan anak setinggi mungkin sehingga tidak harus menjadi nelayan seperti orang tua mereka, tetapi kebanyakan mereka tidak mampu membebaskan diri dari profesi nelayan. Turun-temurun adalah nelayan (Mubyarto, 1989). Hampir setiap tahun jumlah anak-anak nelayan di seluruh wilayah Indonesia yang putus sekolah mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah anak nelayan putus sekolah tersebut dipicu oleh terus memburuknya kemiskinan keluarga mereka. Memburuknya kemiskinan nelayan tersebut terjadi seiring dengan terus menurunnya pendapatan melaut mereka (Suhana, 2006).

Masyarakat nelayan sendiri secara geografis adalah masyarakat yang hidup, tumbuh, dan berkembang dikawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut (Kusnadi, 2009:27). Sedangkan menurut M. Khalil Mansyur mengatakan bahwa masyarakat nelayan dalam hal ini bukan berarti

mereka yang dalam mengatur hidupnya hanya mencari ikan di laut untuk menghidupi keluarganya akan tetapi juga orang-orang yang integral dalam lingkungan itu. Masyarakat nelayan dalam konteks penelitian ini yaitu masyarakat yang tinggal menetap didaerah pinggir pantai dan bermata pencaharian sebagai nelayan yakni dengan menangkap ikan dilaut dengan menggunakan alat tangkap seperti jaring, pancing,dll.

Dari beberapa definisi masyarakat nelayan dan definisi nelayan yang telah disebutkan diatas dapat ditarik suatu pengertian bahwa :

- 1) Masyarakat nelayan adalah kelompok manusia yang mempunyai mata pencaharian menangkap ikan laut.
- 2) Masyarakat nelayan bukan hanya mereka yang mengatur kehidupannya hanya bekerja dan mencari ikan di laut, melainkan mereka yang juga tinggal disekitar pantai walaupun mata pencaharian mereka adalah bercocok tanam dan berdagang.

7. Landasan Teori Sosiologi

a. Teori Konflik

Pemikiran Marx memandang masyarakat dalam pendekatan kelas. Karl Marx (Stephen K. Anderson, 1993:12-13) berpendapat bahwa bentuk-bentuk konflik yang terstruktur antara berbagai individu dan kelompok muncul terutama melalui terbentuknya hubungan-hubungan pribadi dalam produksi. Sampai pada titik tertentu dalam evolusi kehidupan sosial manusia, hubungan pribadi dalam produksi mulai menggantikan pemilihan komunal atas kekuatan-kekuatan produksi. Dengan demikian masyarakat terpecah menjadi kelas-kelas sosial berdasarkan kelompok-kelompok yang memiliki dan mereka tidak memiliki kekuatan-kekuatan produksi. Dalam masyarakat yang telah terbagi berdasarkan kelas, maka kelas sosial yang memiliki kekuatan-kekuatan produksi dapat mensub-ordinasikan kelas-kelas sosial yang lain sekaligus memaksanya untuk bekerja memenuhi kepentingannya. Jadilah kelas dominan menjalin hubungan dengan kelas-kelas yang tersub-ordinasi dalam sebuah proses eksploitasi ekonomi. Secara alamiah saja, kelas-kelas yang tersub-ordinasi ini akan marah.

Dengan pemikiran demikian, Marx telah melakukan pendekatan konflik. Artinya masyarakat terpecah dan akan berkonflik ketika kelas tertentu memiliki faktor produksi sementara kelas yang lain tidak memiliki faktor produksi. Dalam uraian selanjutnya, Marx menyebut kelas yang memiliki faktor produksi adalah kaum borjuis dan kelas yang tidak memiliki faktor produksi adalah kaum proletar. Maka yang terjadi adalah adanya “penindasan” oleh kaum borjuis kepada kaum proletar. “Penindasan” itu berupa pemaksaan terhadap kaum proletar untuk

memenuhi kepentingan kaum borjuis. Inilah yang disebut eksploitasi ekonomi. Sekeras apapun usaha kaum proletar justru akan memperkaya kaum borjuis. Dampaknya, akan ada kemarahan yang berujung revolusi untuk membuat ketertiban sosial dari kaum proletar.

Analisis Marx menjadi inspirasi pendekatan konflik modern. Dalam hal ini Stephen K Sanderson (1993:12) menyebutkan bahwa, beberapa strategi konflik marxian-modern adalah sebagai berikut:

1. Kehidupan sosial pada dasarnya merupakan arena konflik atau pertentangan diantara dan didalam kelompok-kelompok yang bertentangan.
2. Sumber-sumber daya ekonomi dan kekuasaan-kekuasaan politik merupakan hal penting, sehingga berbagai kelompok berusaha merebutnya.
3. Akibat tipikal dari pertentangan ini adalah pembagian masyarakat menjadi kelompok yang determinan secara ekonomi dan kelompok yang tersubordinasi.
4. Pola-pola sosial dasar suatu masyarakat sangat ditentukan oleh pengaruh sosial dari kelompok yang secara ekonomi merupakan kelompok yang determinan.
5. Konflik dan pertentangan sosial didalam dan diantara berbagai masyarakat melahirkan kekuatan-kekuatan yang menggerakkan perubahan sosial.
6. Karena konflik dan pertentangan merupakan ciri dasar kehidupan sosial, maka perubahan sosial menjadi hal yang umum dan sering terjadi.

Selanjutnya Weber memiliki pandangan yang berbeda. Menurut R. Collins (Stephen K. Anderson 1993: 13), Weber meyakini bahwa konflik terjadi dengan

cara yang jauh lebih dari sekedar kondisi-kondisi material. Weber mengakui bahwa konflik dalam memperebutkan sumber daya ekonomi merupakan ciri dasar kehidupan sosial. Tetapi jangan dilupakan bahwa banyak tipe-tipe konflik lain yang juga terjadi. Diantara berbagai tipe konflik tersebut, Weber menekankan dua tipe yang sangat penting.

Pertama, yaitu bahwa konflik dalam arena politik sebagai sesuatu yang sangat fundamental. Baginya kehidupan sosial dalam kadar tertentu merupakan pertentangan untuk memperoleh kekuasaan dan dominasi oleh sebagian individu dan kelompok tertentu terhadap yang lain dan dia tidak menganggap pertentangan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Sebaliknya Weber melihat dalam kadar tertentu sebagai tujuan pertentangan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Lebih jelasnya Weber melihat dalam kadar tertentu sebagai tujuan pertentangan itu sendiri ; ia berpendapat bahwa pertentangan untuk memperoleh kekuasaan tidaklah terbatas hanya pada organisasi-organisasi politik formal, tetapi juga terjadi di dalam setiap tipe kelompok seperti organisasi keagamaan dan pendidikan.

Kedua, adalah tipe konflik dalam hal gagasan dan cita-cita. Ia berpendapat bahwa orang seringkali tertantang untuk memperoleh dominasi dalam hal pandangan dunia terbuka, baik itu berupa doktrin keagamaan, filsafat sosial ataupun konsepsi tentang bentuk gaya hidup kultural yang terbaik. Lebih dari itu, gagasan cita-cita tersebut bukan hanya dipertentangkan, tetapi dijadikan senjata atau alat dalam pertentangan lainnya, misalnya pertentangan politik. Jadi orang dapat berkelahi untuk memperoleh kekuasaan dan pada saat yang sama, berusaha

saling meyakinkan satu sama lain bahwa bukan kekuasaan itu yang mereka tuju tetapi kemenangan prinsip-prinsip yang secara etis dan filosofis benar.

Lewis A. Coser (Margaret M. Poloma, 1992:103) mengakui bahwa beberapa susunan struktural merupakan hasil persetujuan dan konsensus, yang menunjukkan pada proses lain yaitu konflik sosial. Dalam membahas berbagai situasi konflik, Coser membedakan konflik yang realistis dan tidak realistis. Konflik yang realistis berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan dan ditunjuk pada obyek yang dianggap mengecewakan. Para karyawan yang mengadakan pemogokan melawan manajemen merupakan contoh dari konflik realistis, sejauh manajemen memang berkuasa dalam hal kenaikan gaji serta berbagai keuntungan buruh lainnya. Adapun konflik yang tidak realistis adalah yang bukan dari tujuan-tujuan saingan antagonis, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan., paling tidak dari satu pihak. Contoh lain dalam hubungan antar kelompok, pengkambing hitaman digunakan untuk menggambarkan keadaan saat seseorang menggunakan kelompok pengganti sebagai objek tersangka dengan tidak melepaskan prasangka mereka terhadap kelompok lawan.

Menurut Dahrendorf, analisis masyarakat itu bertitik tolak dari kenyataan bahwa para anggotanya dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu mereka yang menguasai dan yang dikuasai. Dualisme ini adalah yang termasuk struktur dan hakikat hidup bersama, memberi akibat akan kepentingan yang berbeda dan

saling berlawanan. Uraian ini merujuk dalam tiga konsep, yaitu kekuasaan, kepentingan, dan kelompok sosial.

Bagi Dahrendorf, masyarakat memiliki dua wajah, yakni konflik dan konsensus yang dikenal dengan teori konflik dialektika. Dengan demikian diusulkan agar teori sosiologi dibagi menjadi dua bagian yakni teori konflik dan teori konsensus. Teori konflik harus menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat sedangkan teori konsensus harus menguji nilai integrasi dalam masyarakat. Bagi Ralf, masyarakat tidak akan ada tanpa konsensus dan konflik. Masyarakat disatukan oleh ketidakbebasan yang dipaksakan. Dengan demikian, posisi tertentu di dalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain.

Teori tentang konflik dialektik ini dianggap masih mendapat pengaruh dari Marx. Menurutnya setiap organisasi sosial akan menunjukkan realitas seperti berikut :

- 1) Setiap sistem sosial akan menampilkan konflik yang berkesinambungan.
- 2) Konflik dimunculkan oleh kepentingan oposisi yang tak terhindarkan.
- 3) Kepentingan oposisi tersebut merupakan refleksi dari perbedaan distribusi kekuasaan diantara kelompok dominan dan kelompok lapisan bawah.
- 4) Kepentingan akan selalu membuat polarisasi kedalam dua kelompok yang berkonflik.
- 5) Konflik akan bersifat dialektik karena resolusi terhadap suatu konflik akan menciptakan serangkaian kepentingan oposisi yang baru dan dalam kondisi tertentu akan memunculkan konflik berikutnya.

6) Perubahan sosial selalu ada pada setiap sistem sosial dan hal ini merupakan hasil yang tak terhindarkan dari konflik dialektik dan aneka tipe pola institusional.

b. Teori Fungsionalisme Struktural oleh Robert K. Merton

Secara sosiologis terjadinya suatu pembangunan pada masyarakat memiliki kaitan yang erat dengan teori Fungsionalisme Struktural oleh Robert. K. Merton. Teori ini menekankan kepada keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan di masyarakat. Adapun yang menjadi konsep utamanya adalah fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest dan keseimbangan.

Masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan dan menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian masyarakat akan membawa perubahan juga terhadap bagian yang lain. Semua peristiwa dan semua struktur adalah fungsional pada masyarakat.

Robert.K. Merton mengemukakan bahwa :

- 1) Fungsi adalah akibat-akibat yang dapat diamati yang menuju adaptasi atau penyesuaian dalam suatu sistem.
- 2) Disfungsi adalah akibat-akibat negatif yang muncul dalam penyesuaian suatu sistem.
- 3) Fungsi manifest adalah fungsi yang diharapkan.
- 4) Fungsi laten adalah fungsi yang tidak diharapkan

Suatu pranata tertentu dapat fungsional terhadap suatu unit tertentu dan

sebaliknya disfungsional terhadap unit sosial lain. Apabila struktur yang ada pemerintah Kabupaten Flores Timur berperan sesuai dengan tujuan yang seharusnya dicapai atau diharapkan maka struktur tersebut berperan dengan baik dalam pengertian bersifat positif dan disebut fungsional. Dan bertolak belakang dengan hal tersebut, apabila peran struktur menimbulkan hal-hal yang negatif disanalah peranan dari sistem maupun struktur yang ada tersebut disfungsional.

B. Kerangka Pikir

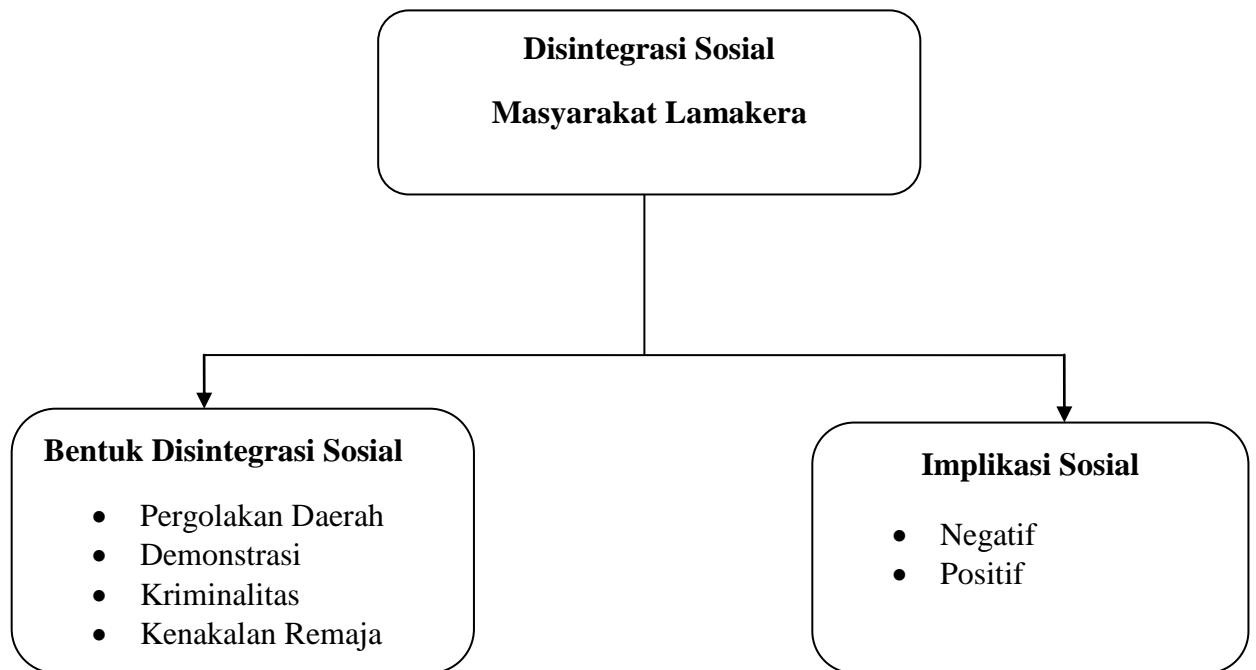
Untuk memudahkan dalam memahami dan menjelaskan hal-hal mengenai disintegrasi sosial masyarakat lamakera dengan pemerintah maka terlebih dahulu membuat kerangka pikir guna melakukan penelitian yang baik. Disintegrasi merupakan suatu hal yang tidak bisa terlepas dalam kehidupan masyarakat, disintegrasi merupakan proses sosial yang pasti akan terjadi ditengah-tengah masyarakat dinamis.

Disintegrasi terjadi karena adanya konflik sosial antara individu atau kelompok masyarakat. Dimana konflik terjadi disebabkan perbedaan pendirian dan keyakinan orang perorangan. Selain itu ada beberapa faktor lain yang menyebabkan terjadinya disintegrasi sosial, seperti: geografi, demografi, kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan. Dimana disintegrasi sosial ini dapat menimbulkan implikasi sosial pada masyarakat, baik itu bersifat positif maupun negatif.

Dalam konflik seperti ini terjadi bentrokan antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah, bentrok yang terjadi antara

masyarakat dengan masyarakat terjadi karena ada masyarakat yang pro dan ada yang kontra dengan pemerintah terkait regulasi perlindungan ikan pari manta.

Bagan Kerangka Pikir



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif digunakan agar mampu memahami dan memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang terkait dengan penelitian ini.

Djam'an Satori (2011:23) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya.

Selain itu, Sugiono (2012:9) juga mengemukakan penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2011:73), penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau

pengubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada penelitian ini, penelitian kuantitatif digunakan untuk menggambarkan bentuk disintegrasi sosial yang terjadi di Lamakera Kabupaten Flores Timur dan implikasi sosial regulasi perlindungan ikan pari manta di Lamakera Kabupaten Flores Timur.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini kurang lebih 1 bulan, yakni bulan Juni sampai dengan Juli 2018, sedangkan lokasi penelitian terletak di Lamakera Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur

C. Informan Penelitian

Menentukan Informan dapat dilakukan dengan cara melalui keterangan orang yang berwenang baik secara formal (pemerintah) maupun informal (non pemerintah pemimpin masyarakat seperti tokoh masyarakat, para nelayan yang berperan dalam masalah ini). Melalui wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti.

Kriteria Informan dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan pengambilan sampel harus di dasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat, atau karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi. Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi.

Berdasarkan pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuannya adalah agar peneliti dapat memperoleh informasi yang akurat dan benar-benar memenuhi persyaratan karena informan tersebut mengetahui secara lengkap tentang lapangan atau daerah penelitian tersebut.

D. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian yang ingin diteliti adalah bentuk disintegrasi sosial dan implikasi sosial regulasi perlindungan ikan pari manta di Lamakera Kabupaten Flores Timur.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Instrumen penelitian sebuah alat bantu untuk memperoleh data dalam penelitian. Instrument penelitian merupakan salah satu unsur penelitian yang sangat penting karena berfungsi sebagai sarana pengumpulan data yang banyak menentukan keberhasilan suatu penelitian.

Melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan alat bantu berupa buku catatan dan camera, sehingga mampu mengukur keadaan di Lamakera Kabupaten Flores Timur

1. Lembar observasi, berisi catatan-catatan yang diperoleh penelitian pada saat melakukan pengamatan langsung di lapangan.
2. Pedoman wawancara merupakan seperangkat daftar pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti sesuai dengan rumusan masalah dan pertanyaan peneliti yang akan dijawab melalui proses wawancara.

F. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, data kualitatif yaitu data yang di sajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. (Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996), h. 2)

1. Jenis Data

a) Data Primer

Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Data primer diperoleh dengan cara penelitian lapangan (field research) yaitu melalui cara pengamatan langsung maupun wawancara dengan narasumber. Adapun informan yang dijadikan sumber data adalah tokoh masyarakat, pemerintah desa dan masyarakat nelayan

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Data sekunder yaitu data yang tidak langsung atau sumber informasi yang diperoleh dari pihak-pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal, artikel dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Data dan Sumber Data

Berikut ini adalah tabel data dan sumber data :

Tabel 3.1. Data dan sumber data

	Data	Sumber Data
T1	Untuk mengetahui bentuk disintegrasi sosial masyarakat Lamakera Kabupaten Flores timur	Sumber datanya diambil dari tokoh pemuda, pemerintah desa dan masyarakat nelayan.
T2	Untuk mengetahui implikasi sosial regulasi perlindungan ikan pari manta	Sumber datanya diambil dari tokoh pemuda, pemerintah desa dan masyarakat nelayan

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan beberapa cara, diantaranya:

1. Observasi

Observasi yaitu teknik penelitian dengan mendatangi lokasi penelitian, mengadakan pengamatan secara langsung terhadap permasalahan yang akan diteliti khususnya pada objek dan subjek penelitian. Observasi merupakan teknik yang mendasar dalam penelitian non tes. Observasi dilakukan dengan pengamatan yang jelas, rinci, lengkap, dan sadar tentang perilaku individu sebenarnya di dalam keadaan tertentu. Pentingnya onbservasi adalah kemampuan dalam menentukan faktor-faktor awal mula perilaku dan kemampuan untuk melukiskan akurat reaksi individu yang diamati dalam kondisi tertentu.

Observasi dalam penelitian kualitatif dilakukan terhadap situasi sebenarnya yang wajar, tanpa dipersiapkan, dirubah atau bukan diadakan khusus untuk keperluan penelitian.

Observasi dilakukan pada obyek penelitian sebagai sumber data dalam keadaan asli atau sebagaimana keadaan sehari-hari.

Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2011: 203) menyebutkan bahwa observasi merupakan proses kompleks yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, diantaranya yaitu proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Menurut Jonathan Sarwono (2006: 224), kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku dan obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.

Menurut Djam'an Satori dan Aan Komariah (2011: 105) observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat dan mengamati seluruh objek dengan menggunakan seluruh alat indra.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab peneliti dengan subjek penelitian atau informan dalam suatu situasi sosial, dengan memanfaatkan metode wawancara ini, maka penulis dapat melakukan penyampaian sejumlah pertanyaan kepada responden secara lisan dengan menggunakan panduan wawancara, tidak ada lain untuk memperoleh data yang dibutuhkan penulis.

Sugiyono (2011: 194) menyebutkan bahwa pengumpulan data melalui wawancara dilakukan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan penelitian dan apabila peneliti ingin mengetahui informasi yang lebih mendalam dari responden yang jumlahnya sedikit. Keunggulan wawancara adalah memungkinkan peneliti mendapatkan jumlah data yang banyak.

Menurut Zulfadrial dan Muhammad Lahir (2012: 69) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen. Dalam hal ini dokumentasi berkaitan dengan sumber informasi, baik informan, buku, undang-undang dan sebagainya.

H. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2009: 335-336), analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke

dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2009: 337-338) mengemukakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan lagi sampai tahap tertentu hingga diperoleh data yang dianggap kredibel. Selain itu, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Teknik analisis data yang dipakai penulis adalah analisis data berlangsung atau mengalir (*flow model analysis*). Ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan pada teknik analisis data tersebut yaitu mengumpulkan data, reduksi data, display data dan verifikasi/menarik kesimpulan.

Analisis data adalah proses analisis kualitatif yang mendasarkan pada adanya hubungan semantis antar variabel yang sedang teliti.

Menurut Miles dan Huberman terdapat tiga teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung

terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul.

1. Reduksi data

Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

I. Teknik Keabsahan Data

Menurut Utama (2012: 112) validitas (keabsahan atau kesahihan) adalah suatu penilaian ketepatan suatu ukuran untuk inferensi atau keputusan spesifik yang dihasilkan dari skor yang dihasilkan. Dengan kata lain, validitas adalah penilaian ketepatan dalam suatu penelitian.

Keabsahan data adalah upaya yang dilakukan dengan cara menganalisa atau memeriksa data, mengorganisasikan data, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting berdasarkan kebutuhan dalam penelitian dan memutuskan apa yang dapat dipublikasikan. Langkah-langkah analisis data akan melalui beberapa tahap yaitu, mengumpulkan data, reduksi data, display data dan

verifikasi/menarik kesimpulan. Peneliti melakukan usaha untuk memperkuat keabsahan datanya yaitu diteliti kredibilitasnya dengan melakukan teknik-teknik sebagai berikut:

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data atau menambah (memperpanjang) waktu untuk observasi. Wawancara yang awalnya hanya satu minggu, maka akan ditambah waktu satu minggu lagi, jika dalam penelitian ini data yang diperoleh tidak sesuai dan belum cocok maka dari itu dilakukan perpanjangan pengamatan untuk mengecek keabsahan data, apabila setelah diteliti kembali dan data sudah benar, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri.

2. Meningkatkan Ketekunan

Prihal dalam meningkatkan ketekunan, peneliti bisa melakukan dengan sering menguji data dengan teknik pengumpulan data yaitu pada saat pengumpulan data dengan teknik observasi dan wawancara, maka peneliti lebih rajin mencatat hal-hal yang detail dan tidak menunda-nunda dalam merekam data kembali, juga tidak menganggap mudah / enteng data dan informasi.

3. Trianggulasi

Trianggulasi merupakan teknik yang digunakan untuk menguji kepercayaan data (memeriksa keabsahan data atau verifikasi data), atau istilah lain dikenal dengan *trustworthinnes*, yang digunakan untuk keperluan

mengadakan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data yang telah dikumpulkan.

BAB IV

DESKRIPSI UMUM DAERAH PENELITIAN DAN

DESKRIPSI KHUSUS LATAR PENELITIAN

A. Deskripsi Umum Kabupaten Flores Timur sebagai Daerah Penelitian

1. Sejarah Singkat Flores Timur

Kabupaten Flores Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor : 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT. Undang-Undang tersebut ditetapkan tanggal **20 Desember 1958** sehingga setiap tanggal **20 Desember** diperingati sebagai **hari ulang tahun Kabupaten Flores Timur**. Pada awal pembentukan Kabupaten Flores Timur terdiri dari 8 Kecamatan yaitu :

Tabel.4.1. Tahun 1958 Kecamatan di Kabupaten Flores Timur

No	Kecamatan	Ibukota
1	Lomblen Timur	Hadakewa
2	Lomblen Barat	Boto
3	Solor	Pamakayo
4	Adonara Timur	Waiwerang
5	Adonara Barat	Waiwadan
6	Larantuka	Larantuka
7	Wulanggitang	Boru
8	Tanjung Bunga	Waiklibang

Pada tahun 1964, terjadi pemekaran Kecamatan di Lomblen dan Solor yaitu : Lomblem Timur dimekarkan menjadi 4 Kecamatan, Lomblen Barat 2 Kecamatan dan Solor dimekarkan menjadi 2 Kecamatan

Tabel 4.2. Pemekaran Kecamatan Lomblen dan Solor

No	Kecamatan	Ibukota
1	Omesuri	Balauring
2	Buyasuri	Wairiang
3	Ile Ape	Waipukan
4	Lebatukan	Hadakewa
5	Atadei	Waiteba
6	Nagawutung	Boto
7	Solor Timur	Menanga
8	Solor Barat	Ritaebang

Pada tahun 1999, ditetapkan UU no 52 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata dan diresmikan oleh Gubernur NTT pada tahun 1999, maka Kabupaten Flores Timur hanya terdiri dari pulau Solor, Adonara dan Flores Timur Daratan.

Tabel 4.3. Tahun 1999 Kecamatan terdiri dari.

No	Kecamatan	Ibukota
1	Wulanggitang	Boru
2	Larantuka	Larantuka
3	Tanjung Bunga	Waiklibang
4	Adonara Timur	Waiwerang
5	Adonara Barat	Waiwadan
6	Solor Timur	Menanga
7	Solor Barat	Ritaebang

Pada tahun 2001, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No.7 tahun 2001 tentang Peningkatan Status kecamatan pembantu menjadi kecamatan

definitif maka jumlah kecamatan di Kabupaten Flores Timur menjadi 13

Kecamatan terdiri dari :

Tabel 4.4. Tahun 2001 Kecamatan terdiri dari.

No	Kecamatan	Ibukota
1	Wulanggitang	Boru
2	Larantuka	Larantuka
3	Tanjung Bunga	Waiklibang
4	Adonara Timur	Waiwerang
5	Adonara Barat	Waiwadan
6	Solor Timur	Menanga
7	Solor Barat	Ritaebang
8	Titehena	Lato
9	Ile Mandiri	Lewohala
10	Wotan ulumado	Baniona
11	Ile Boleng	Senadan
12	Witihama	Witihama
13	Kelobagolit	Pepakelu

Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No.2 tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Baru maka jumlah kecamatan di Kabupaten Flores Timur menjadi 19 Kecamatan terdiri dari :

Tabel 4.5. Tahun 2006 Kecamatan terdiri dari

No	Kecamatan	Ibukota
1	Wulanggitang	Boru
2	Ile Bura	Lewotobi
3	Titehena	Lato
4	Demon Pagong	Lewokluok

5	Larantuka	Larantuka
6	Ile Mandiri	Lewohala
7	Lewolema	Kawaliwu
8	Tanjung Bunga	Waiklibang
9	Solor Barat	Ritaebang
10	Solor Timur	Menanga
11	Wotan Ulumado	Baniona
12	Adonara Barat	Waiwadan
13	Adonara Tengah	Lewobebe
14	Adonara Timur	Waiwerang
15	Ile Boleng	Senadan
16	Witihama	Witihama
17	Kelubagolit	Pepakelu
18	Adonara	Sagu
19	Solor Selatan	Kalike

Sekarang Kabupaten Flores Timur mempunyai 19 Kecamatan dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 8 Tahun 2009 terjadi lagi pemekaran kecamatan baru, yakni Kecamatan Solor Selatan dengan ibu Kota Kecamatan Kalike.

2. Kondisi Geografis dan iklim

Luas Wilayah Kabupaten Flores Timur adalah 5.983,38 km² terdiri dari Luas daratan 1.812,85 km² dan luas perairan sekitar 4.170,53 km² sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No 13 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007 – 2027 yang terdiri dari 19 kecamatan terbagi ke dalam 229 desa dan 21 kelurahan. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Wulanggitang (14,11%) dari total

luasan Kabupaten Flores Timur, sedangkan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Solor Selatan (1,74 %).

Tabel 4.6. Luas wilayah Kabupaten menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Luas Daerah (Km ²)	Luas (%)
1	Wulanggitang	11	-	255,96	14,11
2	Ile Bura	7	-	48,53	2,68
3	Titehena	14	-	211,70	11,68
4	Demon Pagong	7	-	57,37	3,16
5	Larantuka	2	18	75,91	4,19
6	Ile Mandiri	8	-	74,24	4,10
7	Lewolema	7	-	108,61	5,99
8	Tanjung Bunga	16	-	234,55	12,94
9	Solor Barat	18	1	55,97	7,08
10	Solor Timur	17	-	66,56	3,67
11	Wotan Ulumado	12	-	75,81	4,18
12	Adonara Barat	18	-	55,97	3,09
13	Adonara Tengah	13	-	57,99	3,20
14	Adonara Timur	19	2	108,94	6,01
15	Ile Boleng	21	-	51,39	2,83
16	Witihama	16	-	77,97	4,30
17	Kelubagolit	12	-	45,12	2,49
18	Adonara	8	-	46,45	2,56
19	Solor Selatan	7	-	31,58	1,74

Menurut letak geografis wilayah administrative Kabupaten Flores Timur berbatasan langsung dengan wilayah administratif:

- a. Sebelah Utara :Laut Flores
- b. Sebelah Selatan :Laut Sawu

- c. Sebelah Barat :Kabupaten Sikka
- d. Sebelah Timur :Kabupaten Lembata

Seperti halnya di wilayah lain di Indonesia, Kabupaten Flores Timur juga hanya dikenal 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada bulan Juni – September arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember – Maret arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudera Pasifik hingga terjadi musim hujan. Keadaan seperti ini berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April – Mei dan Oktober – Nopember. Hal ini menjadikan Flores Timur sebagai wilayah yang tergolong kering, dimana hanya 4 bulan (Januari, Pebruari, Maret dan Desember) yang keadaannya relative basah serta 8 bulan sisanya relative kering.

3. Topologi, Geologi dan Hidrologi

Secara topografi bentangan alam Kabupaten Flores Timur merupakan wilayah yang berbukit dan bergunung. Kondisi alam tersebut ditandai dengan tingkat kemiringan, ketinggian dan tekstur tanah.

Tabel 4.7. Tingkat kemiringan, ketinggian dan tekstur tanah

No	Kemiringan/Ketinggian/Tekstur Tanah	Luas (Km2)
1	Kemiringan :	
	v 0 – 12 %	417,20
	v 12 – 40 %	799,86
	v > 40 %	615,79
2	Ketinggian :	
	v 0 – 12 m	568,81
	v 100 – 500 m	934,63
	v > 500m	291,41

3	Tekstur Tanah :	
	v Kasar	934,63
	v Sedang	856,17
	v Halus	38,56

Sumber: RTRW Kabupaten Flores Timur, Tahun 2007-2027

Dari segi hidrologi, Kabupaten Flores Timur memiliki 290 mata air yang tersebar di seluruh kecamatan dengan debit antara 0,5–20 liter perdetik. Sumber mata air tersebut umumnya berada pada kawasan hutan. Potensi kawasan hutan lindung yang perlu dijaga terdapat di kecamatan Ile Mandiri, Adonara Tengah, Ile Boleng, Wotan Ulumado, Adonara Timur, Demon Pagong, Ile Bura, Larantuka, Lewolema, Tanjung Bunga, Titehena dan Wulanggitang yang berfungsi melindungi kawasan yang ada di bawahnya dengan luas 27.996, 56 ha.

4. Kondisi Demografi

a. Kepadatan dan Pesebaran Penduduk

Perkembangan penduduk di Kabupaten Flores Timur pada tahun 2016 berdasarkan jumlah dan kepadatan penduduk.

Tabel 4.8. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Flores Timur

Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah penduduk	Luas wilayah	Kepadatan
1	Wulang Gitang	13.513	225,85	60
2	Titehena	11.685	154,84	75
3	Ilebura	6.295	118,32	53
4	Tanjung Bunga	12.695	257,57	49
5	Lewolema	8.277	92,84	89
6	Larantuka	42.815	48,91	875
7	Ile Mandiri	9.531	72,76	131

8	Demon Pagong	4.416	85,4	52
9	Solor Barat	9.596	128,2	75
10	Solor Selatan	5.057	31,58	160
11	Solor Timur	13.219	66,56	199
12	Adonara Barat	14.166	79,71	178
13	Wotanulumado	8.09	86,31	94
14	Adonara Tengah	11.339	42,73	265
15	Adonara Timur	27.9	91,06	306
16	Ile Boleng	15.047	49,3	305
17	Witihama	14.51	79,43	183
18	Kelubagolit	10.515	44,41	237
19	Adonara	10.223	56,8	180
Total		248.889	1812,58	137

Sumber: Kabupaten Flores Timur Dalam Angka Tahun 2017, BPS

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Larantuka yaitu 42.815 jiwa dengan kepadatan penduduk 875 jiwa/Km² dan yang terendah di Kecamatan Demon Pagong yaitu 4.416 jiwa dengan kepadatan penduduk 52 jiwa/Km².

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 4.9. Persentase Penduduk Usia di Atas 10 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah yang Dimiliki Tahun 2016

No	Pendidikan Tertinggi	Laki-Laki (%)	Perempuan (%)	Jumlah (%)
1	Tidak Punya Ijazah	34,36	34,58	34,48
2	SD/MI	33,97	39,31	36,81
3	SMT/MTS	10,73	9,2	9,92
4	SMU/Madrasah Aliyah	13,35	10,6	11,89
5	SMA/Setingkat SMU	3,05	2,08	2,58

6	Diploma I dan II	0,26	0,42	0,34
7	Diploma III	0,75	0,42	0,57
8	Diploma IV, S1, S2, S3	3,52	3,39	3,45
Jumlah		100,00	100,00	100,00

Sumber: Kabupaten Flores Timur Dalam Angka Tahun 2017, BPS

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel. 4.10. Jumlah Penduduk Kabupaten Flores Timur Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016

No	Kecamatan	Jenis kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Wulanggintang	6,64	6,873	13,513
2	Titehena	5,715	5,97	11,685
3	Larantuka	21,165	21,65	42,815
4	Ile Mandiri	4,68	4,851	9,531
5	Tanjung Bunga	6,29	6,405	12,695
6	Solor Barat	4,402	5,194	9,596
7	Solor Timur	6,12	7,099	13,219
8	Adonara Barat	6,974	7,192	14,166
9	Wotan Ulumado	3,905	4,185	8,09
10	Adonara Timu	13,136	14,764	27,9
11	Kelubagolit	4,819	5,696	10,515
12	Witihama	6,597	7,913	14,51
13	Ile Boleng	6,777	8,27	15,047
14	Demon Pagong	2,102	2.314	4,416
15	Lewolema	4,029	4,248	8,277
16	Ile Bura	3,017	3,278	6,295
17	Adonara	4,721	5,502	10,223
18	Adonara Tengah	5,483	5,857	11,339
19	Solor Selatan	2,208	2,849	5,057
Total		118,779	130,11	248,889

Sumber: Kabupaten Flores Timur Dalam Angka Tahun 2017, BPS

B. Deskripsi khusus Lamakera sebagai Latar Penelitian

1. Sejarah singkat Lamakera

Pada jaman tempo dulu, Makanan di sebut dengan ‘Lamak’ dan Wadah/Tempat yang berisi makanan terbuat dari daun Lontar di sebut dengan Kera. Oleh karena itu maka Desa Watobuku pada waktu itu disebut sebagai Kampung Lamakera. Nama Kampung Lamakera adalah Simbol dari LAMAK dan KERA yang artinya “ Ikatan Persaudaraan yang Kuat / Kokoh “ Karena pengaruh perkembangan jaman dan perluasan daerah serta pertumbuhan penduduk yang bertambah dari tahun ke tahun, maka Kampung Lamakera di bentuk menjadi 2 (Dua) Pemerintahan Desa, yaitu : Desa Watobuku dan Desa Motonwutun hingga saat ini.

Lamakera di Desa Watobuku dan Desa Motonwutun sudah mengalami 9 (Sembilan) kali pergantian Kepemimpinan desa dengan nama-nama Pemimpin/Kepala Desa, yang diurutkan sebagai berikut :

Tabel 4.11. Daftar nama-nama kepala Desa di Lamakera

No	Watobuku		Motonwutun	
	Masa jabatan	Kepala desa	Masa jabatan	Kepala desa
1	Tahun 1969 - 1974	Usman P D	Tahun 1969-1973	Syamrah Rahim
2	Tahun 1974 - 1979	Salem Mulan Belaga	Tahun 1974-1980	Syamrah Rahim
3	Tahun 1979 - 1994	Mustafah Ali Pulo	Tahun 1981-1986	Zainal Iskandar
4	Tahun 1994 - 2000	Mustafa Taher	Tahun 1987-1992	Baktiar Key
5	Tahun 2001 - 2006	Mustafah Ali Pulo	Tahun 1993-1998	Abdul Wahab Watan
6	Tahun 2007 - 2012	Thayib Gege	Tahun 1999-2000	Syaifullah Ebba

7	Tahun 2013 - 2014	Burhan Ratu	Tahun 2001-2007	H. Zainal Arifin
8	Tahun 2014 -2015	Wahidin Dahlan	Tahun 2012-2016	Muhammad Songge
9	Tahun 2016 - 2021	Ibrahim Dasy	Tahun 2016-2021	Hamka K. Songge

Sumber : Profil Desa Watobuku dan Desa Motonwutun Tahun 2017

Secara geografis, Lamakera terletak didaerah rendah dan diatas daerah perbukitan dan berbatu, yang batas-batas, luas, dan jarak/jangkauan wilayahnya sebagai berikut :

1. Batas – batas wilayah Lamakera :

- a) Utara berbatasan dengan : Selat Solor
- b) Timur berbatasan dengan : Pulau Lembata
- c) Selatan berbatasan dengan : Desa Tanawerang
- d) Barat berbatasan dengan : Desa Labelen

2. Luas wilayah desa :

a. Luas wilayah seluruhnya 5,5 Ha, terdiri dari :

- 1) Hutan : 0,5 Ha
- 2) Pertanian : 0 Ha
- 3) Perkebunan : 0 Ha
- 4) Pemukiman : 5 Ha

b. Jarak wilayah dari desa ke kota pusat/ibu kota :

- 1) Ke Ibu Kota Kecamatan : 13 km
- 2) Ke Ibu Kota Kabupaten : 45 km
- 3) Ke Ibu Kota Propinsi : 250 km

2. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek yang sangat urgen dalam hidup, keberadaan pendidikan merupakan ruang ilmiah dimana berlangsungnya suatu proses transformasi ilmu pengetahuan dari tenaga pendidik terhadap siswa Masyarakat Lamakera sudah sadar sepenuhnya bahwa pendidikan memegang peran penting untuk kehidupan, sehingga sekarang ini di Lamakera umumnya anak-anak usia sekolah sedang dibangku pendidikan.

Sarana-prasarana pendidikan yang ada di Lamakera :

- a) TK/PAUD : 1 Unit
- b) Sekolah Dasar (SD/MI) : 3 (satu) unit
- c) SMP MTS : 1 Unit
- d) SMA/MA : 1 Unit

Data Penduduk menurut Tingkat Pendidikan;

Tabel 4.12. Tingkat Pendidikan Lamakera

No	Tingkat pendidikan	Jumlah		Satuan	Keterangan
		Watobuku	Motonwutun		
1	Belum Sekolah	96	845	Jiwa	Usia Balita
2	TK/PAUD	79		Jiwa	
3	SD / Sederajat	494	116	Jiwa	
4	SMP / Sederajat	187	50	Jiwa	
5	SMA / Sederajat	163	30	Jiwa	
6	Diploma /Sarjana	76	13	Jiwa	
7	Pasca Sarjana		1	Jiwa	
8	Buta Aksara	423		Jiwa	Lansia

Sumber : Profil Desa Watobuku dan Desa Motonwutun Tahun 2017

3. Mata Pencaharian

Mata pencaharian merupakan aspek yang berkaitan dengan kebutuhan ekonomi manusia. Mata pencaharian di berbagai daerah tidak semuanya sama, itu sangat tergantung pada kondisi geografi dan topografi.

Sebagian besar penduduk Lamakera adalah masyarakat Nelayan. Keadaan iklim yang sering tidak menentu, curah hujan yang tidak pasti, serta lahan yang berbukit dan berbatu, sangat berpengaruh bagi keadaan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Pendapatan perkapita atau perkepala keluarga sangat minim, yakni perbulan rata-rata Rp.500.000,-. Untuk menunjang pemenuhan kebutuhan rumah tangga, rata-rata kepala keluarga memiliki ternak/hewan piaraan, seperti : kambing, dan ayam. Dalam jangka waktu tertentu atau musim-musim tertentu beberapa penduduk juga menjalankan profesi sebagai tukang kayu, tukang batu/bangunan, dan Petani, namun tidak rutin sepanjang tahun. Sehingga klasifikasi penduduk menurut mata pencaharian secara pasti sebagaimana tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel 4.13. Keadaan Ekonomi Penduduk Lamakera

No	Mata Pencaharian	Jumlah		Satuan	Keterangan
		Watobuku	Motonwutun		
1	Nelayan	175	193	Jiwa	
2	Petani	3	2	Jiwa	
3	Pedagang	19		Jiwa	
4	Tukang Kayu / Batu	23		Jiwa	
5	PNS	37	5	Jiwa	
6	Pensiunan	12	-	Jiwa	
7	Supir	2		Jiwa	

8	Montir / Mekanik	1		Jiwa	
9	Guru Swasta	36	11	Jiwa	
10	Wira Suasta	114	4	Jiwa	
11	Buruh Tani	-		Jiwa	
12	Belum bekerja		835	Jiwa	
13	Lain-lain	1096	6	Jiwa	

Sumber : Profil Desa Watobuku dan Desa Motonwutun Tahun 2017

4. Kondisi Sosial Budaya

Adat adalah kebiasaan-kebiasaan yang berlangsung dan menjadi norma dalam masyarakat atau pola-pola perilaku tertentu dari warga masyarakat di suatu daerah. Dalam adat istiadat terkandung serangkaian nilai, pandangan hidup, cita-cita pengetahuan dan keyakinan serta aturan-aturan yang saling berkaitan sehingga membentuk satu kesatuan yang bulat. Fungsinya sebagai pedoman tertinggi dalam bersikap dan berperilaku bagi seluruh warga masyarakat. Dan setiap daerah memiliki adat istiadat atau kebiasaan yang berbeda-beda, sesuai dengan struktur social dalam masyarakat tersebut.

Dapat di amati pola kebudayaan masyarakat Lamakera Kabupaten Flores Timur yang dari dulu sampai sekarang masih ada didesa tersebut. Pola kehidupan masyarakat desa sangat intim antara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok yang lain. Seperti ketika sebuah keluarga melakukan pekerjaan bangunan suatu rumah maka tanpa adanya sosialisasi pun mereka dengan sendirinya ikut membantu mengerjakan rumah tersebut. Budaya gotong royong dalam pembangunan rumah sebuah keluarga, masyarakat yang lain tanpa dimintai pertolongan mereka akan membantu dengan ikhlas. Begitupun dengan sistem

kekerabatan masyarakat Lamakera masih sangat erat hubungan ikatan persaudaraannya. Hal itu bisa dilihat dari sistem kekeluargaan di masyarakat tersebut. Di masyarakat Lamakera setiap keluarga mempunyai rumah masing-masing tetapi rumah yang dibangun oleh suatu keluarga akan selalu dekat dengan anggota keluarga yang lain. Misalnya saja, sebuah keluarga mempunyai anak laki-laki yang akan menikah atau akan berkeluarga, orang yang akan berkeluarga tersebut akan membuat rumah dekat dengan rumah orang tuanya. Hal itu dilakukan agar orang yang akan berkeluarga tersebut masih dapat menjaga orang tuanya jika sudah tua begitu juga dengan anggota keluarga lainnya. Untuk anak perempuan yang akan menikah biasanya akan ikut dengan suaminya untuk tinggal dengan orang tua suaminya.

5. Kehidupan Keberagaman

Agama merupakan sebuah kepercayaan yang dianut oleh seseorang. Agama adalah sebuah ajaran atau sistem yang mengatur tata cara peribadatan kepada Tuhan dan hubungan antar manusia. Dalam ajaran sebuah agama, setiap penganutnya diajari agar saling hidup rukun dengan sesama manusia. Di Lamakera kehidupan beragama masyarakat berjalan damai karena dimana masyarakat memahami bahwa agama merupakan sesuatu yang berhubungan dengan keyakinan.

Tabel .4.14. Jumlah penduduk berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah		Satuan	Keterangan
		Watobuku	Motonwutun		
1	Islam	1517	1056	Jiwa	
2	Kristen Katolik	1	-	Jiwa	

3	Kristen Protestan	-	-	Jiwa	
4	Hindu	-	-	Jiwa	
5	Budha	-	-	Jiwa	
6	Konghucu	-	-	Jiwa	

Sumber : Profil Desa Watobuku dan Desa Motonwutun Tahun 2017

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lamakera Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif yang memberikan gambaran dan informasi mengenai disintegrasi sosial studi regulasi perlindungan ikan pari manta masyarakat Lamakera Kabupaten Flores Timur.

Pada bab ini peneliti akan menyajikan data-data hasil penelitian yang dilakukan di lapangan yaitu di Lamakera dengan melibatkan beberapa informan yakni pemerintah desa, tokoh pemuda, masyarakat nelayan setempat. Informan tersebut yang memberikan informasi yang berkaitan dengan fokus dalam penelitian ini yaitu baik yang berkaitan dengan bentuk disintegrasi sosial masyarakat Lamakera Kabupaten Flores Timur dan implikasi sosial regulasi perlindungan ikan pari manta.

1. Bentuk Disintegrasi Sosial Masyarakat Lamakera Kabupaten Flores Timur

Menurut Soekanto (2012), disintegrasi dapat dirumuskan sebagai suatu proses berpardanya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat karena perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Proses perubahan sosial akan menyebabkan nilai dan norma masyarakat menjadi tergeser atau berubah. Disintegrasi dapat diartikan sebagai keadaan tidak bersatu padu, keadaan terpecah belah, hilangnya keutuhan atau persatuan, dan perpecahan yang

disebabkan tidak berlakunya norma-norma di masyarakat. Dalam ilmu sosiologi disintegrasi diartikan sebagai proses terpecahnya suatu kesatuan menjadi bagian-bagian kecil yang terpisah satu sama lain. Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan diperoleh informasi mengenai bentuk disintegrasi sosial masyarakat Lamakera Kabupaten Flores Timur. Menurut masyarakat nelayan JI (28 Tahun) yang mengatakan bahwa bentuk disintegrasi sosial masyarakat Lamakera :

“Awalnya terjadi konflik karena adanya kepmen itu mereka melarang kami tangkap pari manta mereka melarang terus kami makan apa, pencaharian kami semata hanya itu. Konflik terjadi itu antara mereka yang sepakat dengan adanya kepmen dengan kami yang tidak terima dengan kepmen ini, mereka terima kepmen itu karena mereka dapat pekerjaan dari LSM nantinya, terus kami kerja apa lagi” (Wawancara pada tanggal 03 Juli 2018).

Menurut Max Weber baginya konflik merupakan unsur dasar kehidupan masyarakat. Di dalam masyarakat tentunya memiliki pertentangan-pertentangan dan pertentangan tersebut tidak bisa dilenyapkan dari kehidupan masyarakat. Max Weber juga menyatakan bahwa masalah kehidupan modern dapat dirujuk ke sumber materialnya yang riil misalnya struktur kapitalisme. Bagi Max Weber konflik sebagai suatu sistem otoritas atau sistem kekuasaan, dimana kekuasaan cenderung menaruh kepercayaan kepada kekuatan. Menurut data observasi yang dilakukan, diperoleh informasi dari informan bapak KS (57 Tahun) bahwa :

“Masalah pari ini semua kendalanya dari Sukur Senon mereka mau bangun pariwisata disini kami tidak mau walaupun pak Kepala Motonwutun mau jangan sampai mengganggu kita Islam ini, maka dari itu kasus mereka hampir pukul dia itu. Tapi kapolda dari Kupang memberikan kami pandangan bahwa pari ini dia tidak larang cuman dia bilang kalau ada kapal dari luar Negeri menangkap ikan tuna di kita punya perairan tolong hubungi saya pada saat itu dia kasih juga nomor teleponnya. Orang Alor satu dia bilang sama saja di Alor juga ikan pari ini kita larang di tempat mana mereka inikan mencari hidup di kampung ini semata-mata hanya ikan pari, anak sekolah sampai Drs, sarjana hukum dijadikan dari ikan pari ini kita larang bagaimana kita setiap bulan terima tapi masyarakat ini. Pada saat itu kame dengan bule kendala pada Tahun 1980 mereka dari Amerika datang di kita punya kampung dan dengan saya pergi laut untuk foto ikan pari, paus dan lumba-lumba saya tombak mereka video masuk di tv kemudian mereka buka di rumahnya Sukur Senon. Sampai hari ini bertahun-tahun UU Kepmen No 04 Tahun 2014 ini juga kami masih tombak pada saat kendala sosialisasi Kepmen No 04 Tahun 2014 ini kami tidak tombak lagi kenapa Lamalera masih tombak dan Lamakera tidak bisa”
(Wawancara pada Tanggal 04 Juli 2018).

Disintegrasi sosial terjadi karena adanya konflik sosial antara individu atau kelompok masyarakat. Dimana dalam konflik pasti ada perselisihan dan pertentangan diantara pihak-pihak yang berkonflik. Konflik bisa dialami oleh

siapa saja pada berbagai lapisan sosial masyarakat. Seperti halnya konflik yang terjadi antara masyarakat Lamakera dengan pemerintah Kabupaten Flores Timur maupun masyarakat dengan masyarakat yang mengakibatkan terjadinya disintegrasi. Adapun hasil wawancara dari informan untuk mendapatkan informasi mengenai bentuk disintegrasi sosial masyarakat Lamakera Kabupaten Flores Timur. Menurut bapak kepala Desa Watobuku ID (55 Tahun) mengatakan bahwa :

“Terkait dengan pari manta ini kalau untuk watobuku sebenarnya bisa dikatakan suatu tujuan, tetapi ada segelintir orang yang menggunakan kepentingan individu sehingga terjadinya perpecahan kelompok-kelompok. Itu sebenarnya untuk pemberdayaan tentang pari manta ini untuk LSM ini tujuannya bagus hanya mereka melakukannya sangat terburu-buru, waktunya turun sosialisasi itu tidak secara berkala sehingga terjadinya gejolak. Ada beberapa masyarakat yang menyetujui itu ada kepentingan pribadi sedangkan disisi lain pemerintah desa tidak menginginkan keresahan di masyarakatnya karna sala satu hasil dari Lamakera ini adalah penangkapan ika pari manta yang sudah diwariskan para leluhur, jadi paling tidak terjadinya kelompok-kelompok ini itu kerena ada unsur kepentingan-kepentingan pribadi sehingga bisa terjadinya disintegrasi” (Wawancara pada tanggal 09 Juli 2018).

Yang jelas adanya Kepmen ini tentang pelarangan pari manta tetapi kami juga sangat sesalkan soal sosialisasi ini yang tidak secara menoton tetapi paling tidak mereka harus juga menggali adat istiadat daerah yang dimasuki kepmen ini,

apakah ini bertentangan atau bisa dipakai di wilayah itu ternyata daerah lain contohnya pernah mereka masuki itu juga menolak dan itu dikecualikan dan sampai sekarang mereka masih menombak ikan pari itu. Kepmen itu ada mempunyai tujuan yang bagus tetapi harus melihat juga kondisi wilayah setempat sama halnya dengan kita punya di Lamakera ini misalnya gejala-gejala yang timbul itu juga segelintir orang saja.

Dari pendapat informan di atas mengatakan bahwa bentuk disintegrasi masyarakat Lamakera Kabupaten Flores Timur yaitu ada sebuah lembaga LSM ingin melakukan suatu pemberdayaan terhadap masyarakat tetapi hanya saja mereka melakukan secara terburu-buru dan dari sini ada segelintir orang melakukan itu untuk kepentingan individu dan disini mereka ingin mensosialisasikan Kepmen No 04 Tahun 2014 tentang perlindungan ikan pari manta dan masyarakat menganggap itu merupakan suatu pelarangan untuk menangkap pari manta dan tidak ada solusi yang diberikan mengakibatkan konflik dan menyebabkan terjadinya disintegrasi. Adapun menurut informan tokoh pemuda Kakanda HW (32 Tahun) mengatakan bahwa :

“Awalnya terjadi konflik antara masyarakat dengan masyarakat dan pemerintah ini disebabkan dengan adanya kepmen tentang perlindungan ikan pari manta, konflik ini terjadi pada saat pemerintah sosialisasikan kepmen ini dan ada masyarakat yang menerima kepmen tersebut. Kalau kepmen/peraturan seperti itu sejatinya harus melakukan tingkatan sosialisasi itu nanti dilihat bagaimana tingkat penerimaannya masyarakat, apakah semua masyarakat indonesia ini terima, negara

inikan terdiri dari beberapa suku, daerah berbeda dan tingkat pencahariannya pun berbeda kalau kemudian pari manta ini dilarang untuk masyarakat khususnya seluruh indonesia ini saya pikir ada semacam kalau bahasa kasarnya mengebiri ya. Kalau seandainya kepmen ini harus diberlakukan itu tidak masalah tapi sekarang pada tingkatan sosialisasinya itu bagaimana tingkat penerimaan dan penolakan masyarakat kira-kira masyarakat terima mungkin ada solusi disana kalau kemudian masyarakat menolak kira-kira apa alasannya itu kan mesti ditelusuri untuk lamakera hari ini masyarakat menolak bukan karena tidak menghormati itu hukum, masyarakat menghormati hukum hanya saja ketika pelarangan dan perlindungan, perlindungan ini saya pahami negara melarang secara halus/lembut. Pari manta ketika dilindungi tidak boleh ditangkap, walaupun ditangkap melalui surat izin kemudian ini dilarang berarti konsekuensinya masyarakat harus berhijrah bahasa kasarnya untuk pekerjaan yang lain sekarang pekerjaan yang lain itu ada solusi tidak'' (Wawancara pada tanggal 10 Juli 2018).

Berdasarkan keseluruhan informasi yang diungkapkan dari keseluruhan informan di atas, ditarik kesimpulan bahwa bentuk disintegrasi sosial masyarakat Lamakera Kabupaten Flores Timur terjadi diakibatkan adanya Kepmen No 04 Tahun 2014 tentang perlindungan pari manta. Dimana pemerintah melakukan sosialisasi terkait kepmen itu masyarakat tidak terima karna tidak ada solusi yang pas untuk menggantikan pari manta itu dan disini ada masyarakat yang mau

menerima kepmen karena mereka nantinya akan mendapatkan jatah dari pemerintahan dan masyarakat yang menolak itu tidak terima dengan masyarakat yang terima tadi maka terjadinya konflik dan berakibat disintegrasi.

2. Implikasi Sosial Regulasi Perlindungan Ikan Pari Manta di Lamakera Kabupaten Flores Timur

Sejenak kita menyimak dengan baik dan seksama keadaan lingkungan sekitar kita, maka hampir pasti kita akan menemukan bahwa semuanya mengalami perubahan, entah alam, dunia, maupun masyarakat. Semuanya berubah. Tidak ada yang tidak alias statis. Semuanya mengalir, itu berarti hampir tidak ada sesuatupun dalam hidup ini yang tidak berubah. Tak terkecuali kehidupan sosial dalam masyarakat.

Lazimnya jika terjadi perubahan dalam masyarakat, seperti yang kita lihat dan amati, maka sudah pasti ada dan timbul implikasi tertentu yang dari sisi ilmu-ilmu menarik untuk diikuti dan diamati, entah itu dari segi sikap, perilaku hidup, maupun dari segi hidup yang lain. Seperti halnya dengan kehadiran Kepmen No 04 Tahun 2014 di Lamakera saat ini, yang mengakibatkan terjadinya perubahan sosial yang menimbulkan implikasi-implikasi dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Selo Soemardjan (Dalam Jufri, 2015: 24) mengatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Adanya suatu perubahan dalam masyarakat akibat perubahan sosial bergantung pada kegiatan masyarakat itu sendiri yang mengalami perubahan sosial. Dimana

perubahan sosial yang terjadi tidak selamanya suatu kemajuan (progress). Tetapi juga suatu kemunduran dalam masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh informan bapak ID (55 Tahun) selaku kepala desa, mengatakan bahwa :

“Pertama membuat masyarakat kita resah mereka mau keluar ke laut tidak tenang takut diburuh atau ditangkap, diintrogasi sehingga untuk keluar menuju tujuan ini hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan sebelumnya karna mereka harus menghindar dari aparat, yang jelas sangat parah akibat pelarangan itu, dan pelarangan ini mengakibatkan ekonomi masyarakat terganggu dan tidak memenuhi kebutuhan hidup mereka” (Wawancara pada tanggal 09 Juli 2018).

Adanya Kepmen No 04 Tahun 2014 di dalam lingkungan masyarakat Lamakera akan berdampak pada kehidupan masyarakat itu sendiri tentunya. Dimana dampak negatif yang timbul sangat mempengaruhi bagi kehidupan dan ketentraman masyarakat. Secara sosiologis, konflik lahir karena adanya perbedaan-perbedaan yang tidak atau belum dapat diterima oleh suatu individu dengan individu lain atau antara satu kelompok dengan kelompok tertentu. Dalam kehidupan masyarakat perubahan sosial kadang-kadang dapat menimbulkan ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan tersebut dapat disebabkan adanya kesenjangan budaya dalam masyarakat (disintegrasi sosial). Sama halnya dengan pendapat salah seorang tokoh pemuda Kakanda HW (32 Tahun) mengatakan bahwa :

“Pemerintah mengeluarkan itu Kepmen No 04 Tahun 2014 sehingga menimbulkan kesenjangan antara masyarakat dengan pemerintah,

sehingga ketika masyarakat tidak simpati lagi dengan pemerintah ya maaf-maaf kalau kemudian program pemerintah itu kurang mendapat respon atau kebijakan publik yang dikeluarkan pun oleh karena itu tidak merangkum suara dari masyarakat hasil akhirnya masyarakat tidak respon, dengan demikian partisipasi masyarakat terhadap pemerintah menjadi tidak bagus, itu mungkin merupakan salah satu bentuk penolakan masyarakat terhadap Kepmen itu. Adapun upaya yang mau dilakukan adalah pembangunan wisata di Lamakera jangan sampai ada upaya untuk mau menghancurkan budaya Islam itu sendiri dengan diberbagai macam penerimaan melakukan wisata dengan demikian menyedot wisatawan asing ketika wisatawan asing kita tidak bisa lerai, handal ketika pola pakaiannya mereka seperti itu adanya” (Wawancara pada Tanggal 10 Juli 2018).

Berdasarkan pendapat di atas implikasi dari hadirnya Kepmen sangat mempengaruhi masyarakat Lamakera karena dimana sebelum adanya Kepmen masyarakat aman-aman saja sejak adanya Kepmen tersebut membuat masyarakat resah dan sampai menimbulkan konflik yang berakibat disintegrasi. Perubahan sosial ditandai dengan semakin berkembangnya tingkat pendidikan masyarakat sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak selamanya diterima masyarakat, kadang-kadang masyarakat menolak suatu kebijakan apabila dianggap merugikan atau terlalu memberatkan masyarakat. Hal serupa juga diungkapkan oleh informan tokoh pemuda Kakanda MK (31 Tahun), mengatakan bahwa :

“Sebelum adanya Kepmen No 04 Tahun 2014 masyarakat aman-aman saja kemudian dalam perjalanan untuk mau mensukseskan Kepmen ini di sini ada beberapa kegiatan semacam seminar yang dilakukan. Itu tu minta maaf termasuk saya juga pelakunya sehingga menimbulkan detloknya forum diseminar itu di situ baru kita mengerti ternyata di dalam masyarakat ini juga ada yang bergerak untuk mensukseskannya, ini yang dimobilisasi, dipelopori oleh LSM karena masyarakat mengetahui sebagian masyarakat merespon mendukung itu akhirnya tadinya masyarakat yang pro pemerintah itu dimata masyarakat yang menolak menjadi sesuatu yang tidak aman bagi masyarakat yang menolak disitulah terjadi komunikasi yang tidak baik bahkan hampir saja menuju yang namanya konflik kontak fisik. Karena pemerintah dalam hal ini juga LSM ambil bagian dan LSM ini juga merangkum sebagian masyarakat untuk mensukseskan ini sehingga masyarakat tadi itu menjadi tidak simpati terhadap mereka juga LSM karena memang pada dasarnya mengupayakan suksesnya perlindungan pari panta di Lamakera jadi konflik itu pada dasarnya mulai dari itu sehingga konflik ini kemudian sampai menuju yang namanya caleg dan pilgub akhirnya menjadi konflik yang sulit kita retas” (Wawancara pada Tanggal 11 Juli 2018)

Dari beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kehadiran Kepmen No 04 Tahun 2014 di Lamakera menimbulkan perpecahan yang terjadi antara masyarakat dengan masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah, hal ini terjadi karena sebagian masyarakat tergabung dalam LSM mencoba untuk

mensukseskan kepmen tersebut dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait kepmen ini tidak merangkum masyarakat sehingga masyarakat kurang merespon program yang dijalankan oleh pemerintah.

B. Pembahasan

1. Bentuk Disintegrasi Sosial

Proses disintegrasi sesungguhnya dapat kita jumpai disekitar lingkungan kita dalam kehidupan sehari-hari. Gejala disintegrasi disekitar kita berhubungan dengan masalah-masalah sosial seperti pertengkaran antar anggota keluarga, persengketaan antar anggota masyarakat, percekokan antar tetangga dan perebutan pengaruh, adapun bentuk-bentuk disintegrasi sosial akibat adanya perubahan sosial sebagai berikut.

a. Pergolakan Daerah

Dalam rekam jejak perjalanan bangsa indonesia, beberapa kejadian mengenai konflik/pergolakan daerah sudah banyak terjadi. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya suatu kesenjangan. Kesenjangan tersebut bisa berupa kesenjangan dalam hal kebijakan politik, kesenjangan ketidakadilan, kesenjangan masalah etnis, kesenjangan konflik agama, dan lain sebagainya.

b. Demonstrasi

Demonstrasi menjadi suatu fenomena yang seringkali kita temukan pada saat ini. Dinamika yang terjadi dalam bidang ketatanegaraan yang terjadi di era reformasi turut mempengaruhi terhadap suatu perubahan perilaku masyarakat. Sebelum era reformasi, rakyat mempunyai keterbatasan dalam menyuarakan aspirasinya secara langsung. Kegiatan aksi atau demonstrasi baik secara individu

maupun kolektif akan mendapatkan suatu konsekuensi yang keras dari pihak pemerintah orde baru. Berbeda dengan era demokrasi yang terjadi pada saat sekarang ini. Hampir di setiap sebuah kebijakan pemerintah yang menuai kontroversi, kita menemukan banyak aksi demonstrasi yang terjadi seiring dengan perancangan kebijakan pemerintah yang dianggap kurang menguntungkan bagi golongan tertentu. Golongan tersebut dapat berupa sekelompok ormas, pergerakan mahasiswa, ikatan buruh, persatuan guru, dan lain sebagainya.

c. Kriminalitas

Perkembangan teknologi juga membawa dampak pada disintegrasi sosial. Dewasa ini tindak kriminalitas tidak hanya yang sifatnya kasat mata saja, misalnya perampokan, pembunuhan, pencurian, penjambretan, pembegalan, dan lain sebagainya. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mengakibatkan berkembangnya variasi modus dalam melakukan suatu tindak kejahatan. Misalnya penipuan bermodus undian berhadiah melalui telfon dan berbagai kejahatan yang difasilitasi oleh jaringan internet. Dewasa ini kepolisian sudah membentuk sebuah divisi khusus untuk menangani kasus-kasus yang bermoduskan internet. Hal tersebut dikarenakan begitu maraknya kasus penipuan dan lain-lain yang memkaai fasilitas internet dan telepon.

d. Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja adalah suatu kegiatan anti sosial yang diperbuat oleh seseorang yang beranjak dewasa (remaja), bila hal tersebut dilakukan oleh orang dewasa bisa dikategorikan sebagai tindak kejahatan (crime).

Disintegrasi sosial terjadi karena adanya konflik sosial antara individu atau kelompok masyarakat. Dimana dalam konflik pasti ada perselisihan dan pertentangan diantara pihak-pihak yang berkonflik. Konflik bisa dialami oleh siapa saja pada berbagai lapisan sosial masyarakat. Seperti halnya konflik yang terjadi antara masyarakat Lamakera dengan pemerintah Kabupaten Flores Timur maupun masyarakat dengan masyarakat yang mengakibatkan terjadinya disintegrasi.

Bentuk disintegrasi sosial masyarakat Lamakera Kabupaten Flores Timur terjadi diakibatkan adanya Kepmen No 04 Tahun 2014 tentang perlindungan pari manta. Dimana pemerintah melakukan sosialisasi terkait kepmen itu masyarakat tidak terima karna tidak ada solusi yang pas untuk menggantikan pari manta itu dan disini ada masyarakat yang mau menerima kepmen karena mereka nantinya akan mendapatkan jatah dari pemerintahan dan masyarakat yang menolak itu tidak terima dengan masyarakat yang terima tadi maka terjadinya konflik dan berakibat disintegrasi.

2. Implikasi Sosial Regulasi Perlindungan Ikan Pari Manta

Lamakera Kabupaten Flores Timur Dalam kehidupan bermasyarakat sudah pasti akan mengalami perubahan sosial, dan perubahan sosial yang terjadi akan berimplikasi pada masyarakat. Adapun implikasi sosial yang dihasilkan oleh perubahan sosial yaitu terjadinya perubahan pada struktur, lembaga, sistem, nilai dan norma sosial

Mengapa struktur sosial, lembaga sosial, sistem sosial, nilai dan norma sosial yang pertama-tama mengalami perubahan, manakala terjadi perubahan

sosial dalam masyarakat. karena pokok-pokok itulah yang secara langsung bersentuhan atau kena perubahan sosial.

Dalam konteks perubahan sosial, karena konflik sosial atau kerusuhan yang terjadi di Lamakera, misalnya struktur sosial masyarakat hampir pasti mengalami perubahan baik ke arah positif maupun ke arah negatif. Positifnya sentimen kelompok sebagai yang tidak sepakat dengan adanya kepmen jelas semakin kuat, namun negatifnya ialah hubungan atau relasi dengan kelompok lain yang sepakat dengan adanya kepmen ini, betapapun mungkin masih ada ikatan kekerabatan, agak pasti mengalami kekerenggangan dalam hubungan dan kehangatan. Implikasi yang terjadi diakibatkan adanya kepmen di Lamakera yaitu pertama membuat masyarakat resah mereka mau keluar melaut takut diburuh, diintrogasi sehingga untuk keluar menuju tujuan ini hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan sebelumnya karna mereka harus menghindari dari aparat. Kebutuhan ekonomi masyarakat menyempit atau mandek dikarenakan masyarakat takut untuk beroperasi penangkapan ikan pari manta tersebut, masyarakat Lamakera semata-mata bermata pencaharian penombakan ikan pari manta karena dimana melihat kondisi geografis alam Lamakera tidak mendukung untuk bertani.

3. Langkah Prefentif atau pencegahan Disintegrasi Sosial Masyarakat Lamakera.

Disintegrasi memang akan tetap ada seiring adanya perubahan. Maka dari itu jika disintegrasi terjadi, maka kita harus mengetahui bagaimana cara mengatasi disintegrasi sosial tersebut. Berikut cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya :

- a. Masyarakat harus menanamkan nilai – nilai cinta tanah air, Pancasila, jiwa sebangsa dan setanah air, rasa persaudaraan yang kuat. Ini dilakukan agar masyarakat kita tetap sadar bahwa Indonesia harus bersatu dan agar tercipta kekuatan juga kebersamaan dikalangan masyarakat Indonesia.
- b. Menghilangkan segala macam hal yang menimbulkan primordialisme sempit pada setiap kebijaksanaan dan juga kegiatan agar mencegah terjadinya KKN.
- c. Rakyat harus meningkatkan ketahanan dalam menghadapi segala macam usaha – usaha pemecahbelahan dari anasir luar dan kaki tangannya.
- d. Melarang namun dengan melengkapi dasar juga aturan hukum setiap usaha untuk menggunakan kekuatan yang ada pada massa.
- e. Dalam memerangi separatisme, maka dibutuhkan pembentukan suatu sukarela yang terdiri atas unsur TNI, Polri, dan keikutsertaan masyarakat.
- f. Dalam rangka menanamkan kesetiaan ideologi Pancasila (ideologi yang digunakan bangsa Indonesia) dan mengimplementasikan setiap butir – butir Pancasila.
- g. Menumpas segala macam gerakan separatisme secara tegas dan tidak pernah mengenal kata kompromi dalam hal ini.

Cara untuk mencegah disintegrasi sosial masyarakat Lamakera Kabupaten Flores Timur adalah pemerintah mengeluarkan kebijakan harus sesuai dengan kondisi sosial masyarakat tersebut sehingga tidak terjadinya suatu konflik dan berujung disintegrasi, dan solusi untuk mengatasi disintegrasi sosial di Lamakera terkait adanya regulasi perlindungan ikan pari manta adalah ketika adanya suatu kegiatan adat maka pihak yang berkonflik tadi dikumpulkan menjadi satu dan

mereka akur kembali seperti upacara pernikahan dan lain sebagainya. Dan masyarakat Lamakera ketika ada kegiatan adat maka masalah di luar dari itu mereka tidak membawanya ke dalam kegiatan adat tersebut.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pokok bahasan mengenai disintegrasi sosial studi regulasi perlindungan ikan pari manta masyarakat Lamakera Kabupaten Flores Timur, maka dapat ditarik kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Bentuk disintegrasi sosial masyarakat Lamakera Kabupaten Flores Timur berupa, pergolakan daerah yaitu kesenjangan yang terjadi dalam kebijakan politik mengenai adanya regulasi tentang perlindungan ikan pari manta di Lamakera oleh pemerintah kabupaten Flores Timur sehingga terjadinya konflik sosial. Konflik bisa dialami oleh siapa saja pada berbagai lapisan sosial masyarakat. Seperti halnya konflik yang terjadi antara masyarakat Lamakera dengan pemerintah kabupaten Flores Timur maupun masyarakat dengan masyarakat yang mengakibatkan terjadinya disintegrasi. Disintegrasi sosial yang terjadi di masyarakat Lamakera diawali dengan konflik karena hadirnya regulasi tentang perlindungan ikan pari manta dan disini sebagian masyarakat yang sepakat ingin mensukseskan kepmen tersebut sehingga karena masyarakat mengetahui sebagian masyarakat merespon mendukung itu akhirnya tadinya masyarakat yang pro pemerintah itu dimata masyarakat yang menolak menjadi sesuatu yang tidak aman bagi masyarakat yang menolak disitulah terjadi komunikasi yang tidak baik bahkan hampir saja menuju yang namanya konflik kontak fisik.

2. Implikasi sosial regulasi perlindungan ikan pari manta di Lamakera Kabupaten Flores Timur adanya dampak negatif yang timbul antara yaitu, Implikasi yang terjadi diakibatkan adanya regulasi perlindungan ikan pari manta di Lamakera yaitu pertama membuat masyarakat resah mereka mau keluar melaut takut diburuh, diintrogasi sehingga untuk keluar menuju tujuan ini hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan sebelumnya karna mereka harus menghindar dari aparat. Kebutuhan ekonomi masyarakat menyempit atau mandek dikarenakan masyarakat takut untuk beroperasi penangkapan ikan pari manta tersebut, masyarakat Lamakera semata-mata bermata pencaharian penombakan ikan pari manta karena dimana melihat kondisi geografis alam Lamakera tidak mendukung untuk bertani

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulannya, maka dapat disampaikan saran-saran untuk ditindak lanjuti sebagai berikut:

1. Agar pihak pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan lebih pro rakyat sehingga tidak terjadi lagi konflik antara masyarakat.
2. Sebelum melakukan sosialisasi pemerintah harus memberikan pemahaman kepada semua lapisan masyarakat dari yang terkecil sampai ke yang lebih besar.
3. Harus ada solusi yang diberikan oleh pemerintah terkait regulasi perlindungan ikan pari manta di Lamakera sehingga tidak terjadi konflik di masyarakat yang menyebabkan disintegrasi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Syani. 2007. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- AF, Muchtar. (2014). *Menyusun Business Plan & Rencana Aksi*. Cetakan pertama. Bandung: Yrama Widya.
- Arisandi, Herman. (2015). *Buku Pintar Pemikiran Tokoh-Tokoh Sosiologi Dari Klasik Sampai Modern*. Yogyakarta: IRCiSoD
- Kinseng, A. Rilus, (2014), *Konflik Nelayan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kusnadi. (2010). “*Kebudayaan Masyarakat Nelayan*”. Makalah disampaikan dalam kegiatan Jelajah Budaya Tahun 2010. Diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, di Yogyakarta.
- Murdiyanto, (2003). *Mengenal, Memelihara dan Melestarikan Ekosistem Terumbu Karang Proyek Pembangunan Masyarakat Pantai dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan*. Departemen Kelautan dan Perikanan RI. Jakarta.
- Pongsibanne, Lebba, (2013), *Sosiologi Sebuah Pengantar Tinjauan Pemikiran Sosiologi Perpektif Islam*, Jakarta : Laboratorium Sosiologi Agama.
- Ritzer, Gorge, (2012), *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern* Celeban Timur : Pustaka Pelajar.
- Ritzer, George, (2014), *Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosiologi Modern*. Bantul: Kreasi Wacana.
- Ritzer, Gorge, (2016), *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta : Rajawali pers.
- Sanderson, K. Stephen, (2011), *Makrososiologi Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosiologi*, Jakarta: PT. Raja grafindo Persada.
- Satori Djam'an., Komariah Aan. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: bandung.
- Scott, William R, 2009. *Financial Accounting Theory*. Fifth Edition. Canada Prentice Hall.

Soekanto, Soerjono. (2012). *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sofyan. (2016). *Pendidikan Multikulturalisme : Solusi Ancaman Disintegrasi Bangsa*. Antropologi Sosial Budaya, (Online), jilid 2, No.1, (<http://www.google.co.id>). Diakses pada tanggal 09 juni 2018.

Stigler, G. (1971), *The Theory of Economic Regulation*. Bell Journal of Economics and Management Science 3. Chicago: Rand Corporation.

Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif?*. Bandung : Alfabeta

Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kombinasi (mixed methods)*. Bandung. Alfabeta.

Sukmadinata, Nana Syaodih. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Soleman. B. Taneko, 1984, *Struktur dan Proses Sosial Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*, CV. Rajawali, Jakarta.

Suratman. 2010. *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*. Malang: Intimedia.

Upe, Ambo. (2010). *Tradisi Aliran Dalam Sosiologi Dari Filosofi Positivistik ke Post Positivistik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Zuldafrial, M.Si dan Muhammad Lahir (2012). *Penelitian Kualitatif* . Yuma Pustaka.

<http://tugasekol.blogspot.com/2014/10/apakah-pengertian-dan-gejala-disintegrasi-menurut-soekanto.html>. Diakses pada tanggal 26 Mei 2018.

<http://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-bentuk-dan-penyebab-disintegrasi-sosial-beserta-contohnya-lengkap>. Diakses pada tanggal 09 Juni 2018.

<http://deerniaprill.blogspot.com/2013/06/disintegrasi-kehidupan-sosial-terhadap.html>. Diakses pada tanggal 09 Juni 2018.

<http://bpspldenpasar.info/antara-pari-manta-desa-watubuku-dan-desa-motonwutun-flores-timur/>. Diakses pada tanggal 09 Juni 2018.

<http://bpspldenpasar.kkp.go.id/nelayan-manta-di-kampung-lamaker-temukan-solusi-melalui-silaturahmi>. Diakses pada tanggal 09 Juni 2018.

<https://infonusa.wordpress.com/2015/05/28/kabupaten-flores-timur/>. Diakses pada tanggal 07 Agustus 2018.

<http://florestimurkab.go.id/beranda/profil/geografis-umum/>. Diakses pada tanggal
07 Agustus 2018.

lampiran-lampiran

1. Lembar Observasi
2. Pedoman Wawancara
3. Data Informan dalam Wawancara
4. Data Hasil Wawancara
5. Dokumentasi
6. Permohonan Judul Skripsi
7. Kartu Kontrol Bimbingan Proposal
8. Berita Acara Ujian Proposal
9. Keterangan Perbaikan Hasil Ujian Proposal
10. Kartu Kontrol Bimbingan Skripsi
11. Surat Izin Penelitian

Lembar Observasi

Tempat Observasi : Lamakera

No.	Aspek yang diamati	Keterangan
1.	Deskripsi umum daerah penelitian	
2.	Deskripsi khusus latar penelitian	
3.	Bentuk disintegrasi sosial masyarakat	
4.	Implikasi sosial regulasi perlindungan ikan pari manta	

Pedoman Wawancara

Berikut ini adalah pedoman wawancara dalam penelitian :

1. Apa yang menyebabkan terjadinya disintegrasi sosial masyarakat Lamakera.?
2. Bagaimanakah proses terjadinya disintegrasi sosial masyarakat Lamakera.?
3. Bagaimanakah bentuk disintegrasi sosial masyarakat Lamakera.?
4. Bagaimanakah implikasi sosial regulasi perlindungan ikan pari manta masyarakat Lamakera.?
5. Apakah ada solusi yang ditemukan pasca disintegrasi sosial yang terjadi dimasyarakat Lamakera.?

Data Informan dalam Wawancara

1. Nama : Jeri Ismail (JI)
Umur : 28 Thn
JenisKelamin : Laki-Laki
Jabatan : Masyarakat Nelayan
Alamat : Motonwutun
2. Nama : Kapitan Seruan (KS)
Umur : 57 Thn
JenisKelamin : Laki-Laki
Jabatan : Masyarakat Nelayan
Alamat : Motonwutun
3. Nama : Ibrahim Dasy (ID)
Umur : 55 Thn
JenisKelamin :Laki-Laki
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Watobuku
4. Nama : Haji Wahid (HW)
Umur : 32 Thn
JenisKelamin :Laki-Laki
Jabatan :Tokoh Pemuda
Alamat :Watobuku
5. Nama : Mufarat Kahar (MF)
Umur : 31 Thn
JenisKelamin :Laki-Laki
Jabatan : Tokoh pemuda
Alamat :Watobuku

Data Hasil Wawancara

No.	Hari/Tgl	Umur	Nama	Keterangan
1	03 Juli 2018	28 Thn	Jeri Ismail	<p><i>“Awalnya terjadi konflik karena adanya kepmen itu mereka melarang kami tangkap pari manta mereka melarang terus kami makan apa, pencaharian kami semata hanya itu. Konflik terjadi itu antara mereka yang sepakat dengan adanya kepmen dengan kami yang tidak terima dengan kepmen ini, mereka terima kepmen itu karena mereka dapat pekerjaan dari LSM nantinya, terus kami kerja apa lagi”</i></p>
2 2 22	04 Juli 2018	57 Thn	Kapitan Seruan	<p><i>“Masalah pari ini semua kendalanya dari Sukur Senon mereka mau bangun pariwisata disini kami tidak mau walaupun pak Kepala Motonwutun mau jangan sampai mengganggu kita Islam ini, maka dari itu kasus mereka hampir pukul dia itu. Tapi kapolda dari Kupang memberikan kami pandangan bahwa pari ini dia tidak larang cuman dia bilang kalau ada kapal dari luar Negeri menangkap ikan tuna di kita punya perairan tolong hubungi saya pada saat itu dia kasih juga nomor teleponnya. Orang Alor satu dia bilang sama saja di Alor juga ikan pari ini kita larang di tempat mana mereka inikan mencari hidup di kampung ini semata-mata hanya ikan pari, anak sekolah sampai Drs, sarjana hukum dijadikan dari ikan pari ini kita larang bagaimana kita setiap bulan terima tapi masyarakat ini. Pada saat itu kame dengan bule kendala pada Tahun 1980 mereka dari Amerika datang di kita punya kampung dan dengan saya pergi laut untuk foto ikan pari, paus dan lumba-lumba saya tombak mereka video masuk di tv kemudian mereka buka di rumahnya Sukur Senon. Sampai hari ini bertahun-tahun UU Kepmen No 04 Tahun 2014 ini juga kami masih</i></p>

				<i>tombak pada saat kendala sosialisasi Kepmen No 04 Tahun 2014 ini kami tidak tombak lagi kenapa Lamalera masih tombak dan Lamakera tidak bisa''</i>
3	09 Juli 2018	55 Thn	Ibrahim Dasy	<i>“Terkait dengan pari manta ini kalau untuk watobuku sebenarnya bisa dikatakan suatu tujuan, tetapi ada segelintir orang yang menggunakan kepentingan individu sehingga terjadinya perpecahan kelompok-kelompok. Itu sebenarnya untuk pemberdayaan tentang pari manta ini untuk LSM ini tujuannya bagus hanya mereka melakukannya sangat terburu-buru, waktunya turun sosialisasi itu tidak secara berkala sehingga terjadinya gejala. Ada beberapa masyarakat yang menyetujui itu ada kepentingan pribadi sedangkan disisi lain pemerintah desa tidak menginginkan keresahan di masyarakatnya karna sala satu hasil dari Lamakera ini adalah penangkapan ika pari manta yang sudah diwariskan para leluhur, jadi paling tidak terjadinya kelompok-kelompok ini itu kerena ada unsur kepentingan-kepentingan pribadi sehingga bisa terjadinya disintegrasi’’</i>
4 44	10 Juli 2018	32 Thn	Haji Wahid	<i>“Awalnya terjadi konflik antara masyarakat dengan masyarakat dan pemerintah ini disebabkan dengan adanya kepmen tentang perlindungan ikan pari manta, konflik ini terjadi pada saat pemerintah sosialisasikan kepmen ini dan ada masyarakat yang menerima kepmen tersebut. Kalau kepmen/peraturan seperti itu sejatinya harus melakukan tingkatan sosialisasi itu nanti dilihat bagaimana tingkat penerimaannya masyarakat, apakah semua masyarakat indonesia ini terima, negara inikan terdiri dari beberapa suku, daerah berbeda dan tingkat pencahariannya pun berbeda kalau kemudian pari manta ini dilarang untuk masyarakat khususnya seluruh indonesia ini saya pikir ada semacam kalau bahasa kasarnya mengebiri ya. Kalau seandainya</i>

				<p><i>kepmen ini harus diberlakukan itu tidak masalah tapi sekarang pada tingkatan sosialisasinya itu bagaimana tingkat penerimaan dan penolakan masyarakat kira-kira masyarakat terima mungkin ada solusi disana kalau kemudian masyarakat menolak kira-kira apa alasannya itu kan mesti ditelusuri untuk lamakera hari ini masyarakat menolak bukan karena tidak menghormati itu hukum, masyarakat menghormati hukum hanya saja ketika pelanggaran dan perlindungan, perlindungan ini saya pahami negara melarang secara halus/lembut. Parimanta ketika dilindungi tidak boleh ditangkap, walaupun ditangkap melalui surat izin kemudian ini dilarang berarti konsekuensinya masyarakat harus berhijrah bahasa kasarnya untuk pekerjaan yang lain sekarang pekerjaan yang lain itu ada solusi tidak''</i></p>
--	--	--	--	---

POTO-POTO WAWANCARA



(Wawancara pada Tanggal 03 Juli 2018).



(Wawancara pada Tanggal 04 Juli 2018).



(Wawancara pada Tanggal 09 Juli 2018).



(Wawancara pada Tanggal 10 Juli 2018).



(Wawancara pada Tanggal 11 Juli 2018)



Foto dengan Bapak Kepala Kesbangpol Kabupatern Flores Timur



Proses penangkapan ikan pari manta





Pemerintah melakukan sosialisasi ikan pari manta



Masyarakat Lamakera protes pelaku penangkapan

RIWAYAT HIDUP



Randi M Prakon, Lahir di Lamakera, Kec. Solor Timur, Kab. Flores Timur, Provinsi NTT pada tanggal 04 April 1995 yang merupakan anak kedua dari enam bersaudara, buah hati dari pasangan yang berbahagia Bapak Musa M Prakon dan Ibu Aisyah Bapa. Pendidikan formal dimulai dari SD Negeri Lamakera 2001 dan

tamat pada tahun 2007.

Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MTs Negeri Lamakera dan tamat pada tahun 2010. Pada tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Muhammadiyah Kupang dan tamat pada tahun 2014. Pada tahun 2014 penulis diterima sebagai mahasiswa pada Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar melalui ujian Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Selama menjadi Mahasiswa penulis pernah menjabat sebagai sekretaris bidang humas HMJ Pendidikan Sosiologi dan sekretaris umum di organisasi daerah Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Lamakera (HIPPMAL).